BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

VII.1 Kebijakan Umum

Guna lebih mempertajam Visi dan Misi serta derivasinya pada strategi Pembangunan Jangka Menengah Surabaya Tahun 2016-2021 ke dalam pilihan program unggulan serta program prioritas di masing-masing misi yang disinergikan dengan strategi agar lebih tepat dan terstruktur, maka diperlukan kebijakan yang memenuhi minimal empat perspektif sebagai berikut:

a. Kebijakan pada perspektif masyarakat atau layanan akan ditekankan pada upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan menuju masyarakat yang sentosa secara merata dan berkeadilan. Penyediaan kebutuhan utama sandang, pangan dan papan yang didukung dengan pembangunan berbagai prasarana, sarana dan fasilitas publik sehingga dapat meningkatkan kemudahan akses bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan dasar (kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan lain-lain).
b. Kebijakan pada perspektif proses internal akan diarahkan pada reformasi birokrasi menuju sistem administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menjamin kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan kualitas layanan secara cepat, mudah dan terjangkau sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat.
c. Kebijakan umum pada perspektif kelembagaan diarahkan pada optimalisasi, fungsi koordinasi dan penguatan kelembagaan serta peningkatan kualitas dan kinerja sumber daya aparatur Pemerintah sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, transparan dan akuntabel.

d. Kebijakan umum pada perspektif keuangan diarahkan pada peningkatan dan optimalisasi kebijakan pendapatan daerah serta pengelolaan belanja daerah dan dana perimbangan dari pusat. Pengelolaan aset dan keuangan daerah berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan berpegang pada prinsip-prinsip transparansi dan akuntabel mulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah.

VII.2 Program Pembangunan Daerah

Dalam rangka pencapaian visi misi kota melalui arah kebijakan dan strategi yang telah disebutkan dalam BAB VI maka disusunlah program yang merupakan pedoman bagi SKPD untuk merumuskan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, adapun strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Strategi Menyediakan sarana prasarana pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan

Strategi Menyediakan sarana prasarana pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

a) Penyediaan perlengkapan dan penunjang operasional sekolah
b) Penerimaan dan penilaian peserta didik berbasis teknologi informasi
c) Pembangunan lokal/ruang kelas
d) Penyediaan biaya operasional pendidikan
e) Penyediaan bantuan personal siswa dari keluarga miskin

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 di dukung oleh **Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun** dan **Program Pendidikan Menengah**.

Indikator dari Program Pendidikan Anak Usia Dini, antara lain:

a) Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD
b) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

Indikator dari Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, antara lain:

a) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
b) Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs
c) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs
e) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
f) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
g) Angka Kelulusan (AL) SD/MI
h) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI
i) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

Indikator dari Program Pendidikan Menengah, antara lain:

a) Angka Kelulusan (AL) SMA/MA
b) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK
c) Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK
d) Angka Kelulusan (AL) SMK
e) Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA
f) Persentase siswa kejuruan yang lulus ujian sertifikasi kompetensi
g) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK
h) Angka Putus Sekolah (APS) SMK

Pada tahun 2017-2021, Arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan** yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Indikator dari Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan, antara lain:

a) Persentase PAUD yang ditingkatkan sarana prasarananya
b) Persentase lembaga pendidikan yang sarana prasarananya sesuai standar:
   - SD
   - SMP
   - SMA
   - SMK
c) Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan;

- SD/MI
- SMP/MTs
- SMA/MA/SMK

d) Persentase fasilitas pendidikan dalam kondisi baik

2. Strategi Meningkatkan kualitas pendidikan formal

Strategi Meningkatkan kualitas pendidikan formal, dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

a) Pemantauan pelaksanaan kurikulum secara berkesinambungan
b) Pembinaan peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dengan penekanan pada penguatan akhlak
c) Persiapan dan pelaksanaan ujian sekolah
d) Penyiapan lulusan pendidikan menengah sebagai tenaga kerja yang memiliki keahlian dan daya saing
e) Pembinaan dan pendampingan peningkatan prestasi pendidikan

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 di dukung oleh **Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah**. Untuk strategi d) pada tahun 2016 di dukung oleh **Program Peningkatan Prestasi Non Akademik** dengan indikator Persentase prestasi non akademik.

Indikator dari Program Pendidikan Anak Usia Dini, antara lain:

a) Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD
b) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

Indikator dari Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, antara lain:

a) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
b) Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs
c) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs
e) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
f) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
g) Angka Kelulusan (AL) SD/MI
h) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

i) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

Indikator dari Program Pendidikan Menengah, antara lain:

a) Angka Kelulusan (AL) SMA/MA
b) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK
c) Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK
d) Angka Kelulusan (AL) SMK
e) Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA
f) Persentase siswa kejuruan yang lulus ujian sertifikasi kompetensi
g) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK
h) Angka Putus Sekolah (APS) SMK

Untuk arah kebijakan a) sampai dengan arah kebijakan c) pada tahun 2017-2021, didukung oleh **Program Penerapan Kurikulum** yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Indikator dari Program Penerapan Kurikulum, antara lain:

a) Persentase PAUD yang menerapkan kurikulum sesuai ketentuan
b) Persentase lembaga pendidikan yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum :
   - SD
   - SMP
   - SMA
   - SMK

Sedangkan, untuk arah kebijakan d) sampai arah kebijakan e) pada tahun 2017-2021, didukung oleh **Program Peningkatan Prestasi** yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Indikator dari Program Peningkatan Prestasi, antara lain:

a) Persentase prestasi pada event tingkat provinsi/nasional/internasional pada jenjang :
   - SD
   - SMP
   - SMA
   - SMK
b) Persentase PAUD beprestasi

3. Strategi Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

Strategi Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

a) Pemberian biaya jasa pelayanan Pendidik
b) Peningkatan jenjang pendidikan akademik dan pengembangan kompetensi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
c) Sertifikasi bagi Pendidik

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 di dukung oleh **Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan** dengan indikator persentase pendidik yang kompeten.

Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan** yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Indikator dari Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, antara lain:

a) Persentase guru PAUD yang kompeten
b) Persentase guru yang memiliki sertifikasi :
   - SD
   - SMP
   - SMA
   - SMK
c) Persentase guru yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar :
   - SMP
   - SMA
   - SMK
d) Persentase guru SD yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang dibuktikan melalui ijazah S1 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau AKTA 4
e) Persentase tenaga kependidikan yang kompeten :
   - PAUD

- SD
- SMP
- SMA
- SMK

4. Strategi Meningkatkan manajemen pengelolaan pendidikan formal

Strategi Meningkatkan manajemen pengelolaan pendidikan formal dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

a) Penerapan manajemen pengelolaan berbasis perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pada sekolah
b) Pembinaan dan pendampingan peningkatan akreditasi sekolah

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 di dukung oleh **Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun** dan **Program Pendidikan Menengah**.

Indikator dari Program Pendidikan Anak Usia Dini, antara lain:

a) Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD
b) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

Indikator dari Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, antara lain:

a) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
b) Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs
c) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs
e) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
f) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
g) Angka Kelulusan (AL) SD/MI
h) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI
i) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

Indikator dari Program Pendidikan Menengah, antara lain:

a) Angka Kelulusan (AL) SMA/MA
b) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK
c) Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK
d) Angka Kelulusan (AL) SMK

e) Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA
f) Persentase siswa kejuruan yang lulus ujian sertifikasi kompetensi
g) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK
h) Angka Putus Sekolah (APS) SMK

Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan** yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan indikator:

Persentase lembaga pendidikan yang tertib administrasi jenjang :

- SD
- MI
- SMP
- MTs
- SMA
- MA
- SMK

5. Strategi Meningkatkan kualitas pendidikan nonformal

Strategi Meningkatkan kualitas pendidikan nonformal dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

a) Penjaringan siswa kejar paket
b) Pemberian bantuan biaya operasional pendidikan siswa kejar paket
c) Pembinaan dan pendampingan peningkatan akreditasi Lembaga Kursus dan Pelatihan
d) Fasilitasi dan monitoring pelaksanaan TPA/TPQ dan Kelas Minggu

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 di dukung oleh **Program Pendidikan Non Formal** dengan indikator, antara lain :

a) Persentase lembaga kursus dan pelatihan yang siap untuk diakreditasi
b) Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan

Untuk arah kebijakan a) dan arah kebijakan b) pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Pendidikan Kesetaraan** yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan indikator:

Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan :

- Paket A
- Paket B
- Paket C

Sedangkan, untuk arah kebijakan c) sampai dan arah kebijakan d) pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan** yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Indikator dari Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan, antara lain:

a) Persentase lembaga kursus dan pelatihan yang mendaftar proses akreditasi
b) Persentase pertumbuhan peserta didik yang mengikuti pendidikan masyarakat

6. Strategi Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin

Strategi Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dilaksanakan melalui arah kebijakan Pembayaran iuran jaminan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan kelompok tertentu.

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin** dengan indikator Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan terlayani.

Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin** yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan.

Indikator dari Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, antara lain:

a) Persentase Kepemilikan Jaminan Kesehatan
b) Persentase penduduk miskin yang memanfaatkan pelayanan kesehatan

7. Strategi Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak

Strategi Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu, dan anak dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

a) Pelaksanaan deteksi dini kelainan kehamilan
b) Pemberian imunisasi bayi dan balita

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak** dengan indikator, antara lain :

a) Cakupan Kunjungan Bayi
b) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
c) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes)

Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak** yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan.

Indikator dari Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, antara lain:

a) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
b) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes)
c) Cakupan kunjungan neonatal lengkap
d) Cakupan imunisasi dasar lengkap

8. Strategi Meningkatkan cakupan pelayanan gizi ibu dan anak

Strategi Meningkatkan cakupan pelayanan gizi ibu dan anak dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

a) Pemberian makanan tambahan bagi balita kurang gizi dan makanan pendamping ASI
b) Pendampingan dan pemantauan status gizi ibu hamil/menyusui, bayi dan balita
c) Pemberian makanan tambahan dan suplemen bagi ibu hamil
d) Pendampingan ibu dan anak pada 1000 hari pertama kelahiran
e) Pengembangan kampung ASI

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Perbaikan Gizi Masyarakat** dengan indikator Prevalensi Balita Kurang Gizi (< 20 %).

Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak** yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan.

Indikator dari Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak, antara lain:

a) Prevalensi Balita Gizi kurang
b) Prevalensi Balita gizi buruk
c) Persentase Penimbangan balita
d) Persentase ibu hamil yang mendapatkan 90 tablet Fe

9. Strategi Mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana RSUD dan Puskesmas sesuai standar sarana dan prasarana, tipe rumah sakit, dan perkembangan ilmu kesehatan

Strategi Mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana RSUD dan Puskesmas sesuai standar sarana dan prasarana, tipe rumah sakit, dan perkembangan ilmu kesehatan dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

a) Perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana berdasarkan standar dan perkembangan ilmu kesehatan
b) Peningkatan sarana prasarana kesehatan melalui sistem informasi kesehatan
c) Pemenuhan operasional pelayanan kesehatan
d) Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara berkala dan bersifat preventif
e) Perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana sesuai tipe rumah sakit dan perkembangan ilmu kesehatan

Untuk arah kebijakan a) sampai dengan arah kebijakan c) pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya** dengan indikator persentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu.

Pada tahun 2017-2021, untuk arah kebijakan a) sampai dengan arah kebijakan c) didukung oleh **Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu** yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan.

Indikator dari Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu, yaitu :

a) Persentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu
b) Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik

Sedangkan, untuk arah kebijakan d) sampai dengan arah kebijakan e) pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata** dengan indikator, antara lain :

a) Persentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar RSUD dr. Mohamad Soewandhie
b) Persentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar RSUD Bhakti Dharma Husada

Pada tahun 2017-2021, untuk arah kebijakan d) sampai dengan arah kebijakan e) didukung oleh **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit** yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan.

Indikator dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, antara lain:

a) Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit
b) Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai standar tipe rumah sakit
c) Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif RSUD Bhakti Dharma Husada
d) Rata-rata waktu tunggu layanan rawat jalan RSUD Bhakti Dharma Husada
e) Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif RSUD dr. Mohamad Soewandie

10. Strategi Meningkatkan kinerja pelayanan RSUD dan Puskesmas/Puskesmas Pembantu (Pustu) sesuai standar untuk keselamatan pasien

Strategi Meningkatkan kinerja pelayanan RSUD dan Puskesmas/Puskesmas Pembantu (Pustu) sesuai standar untuk keselamatan pasien dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

a) Pelaksanaan akreditasi puskesmas & rumah sakit dan pemantauan implementasinya secara berkala
b) Peningkatan mutu SDM kesehatan melalui sertifikasi dan akreditasi
c) Pengembangan manajemen serta pelayanan kesehatan rujukan, medik, administrasi, dan keperawatan di sarana kesehatan

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan** dengan indikator, antara lain :

a) Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi
b) Persentase sarana kesehatan berizin yang memenuhi standar sarana kesehatan

Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan** yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan.

Indikator dari Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, antara lain:

a) Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin
b) Persentase sarana kesehatan yang memiliki izin
c) Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada
d) Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit dr. Mohamad Soewandhie

11. Strategi Menjamin ketersediaan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan di sarana kesehatan sesuai kebutuhan

Strategi Menjamin ketersediaan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan di sarana kesehatan sesuai kebutuhan dilaksanakan melalui arah kebijakan Perencanaan dan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan berbasis kebutuhan.

Arah kebijakan diatas pada tahun 2016 didukung oleh **Program Obat dan Perbekalan Kesehatan** dengan indikator :

a) Persentase ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan
b) Persentase ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD dr. M. Soewandhie
c) Persentase ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada

Untuk arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit** yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan.

Indikator dari Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit, antara lain:

a) Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD dr. M. Soewandhie
b) Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada

Selain itu, arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 juga didukung oleh **Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu** yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan.

Indikator dari Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu adalah Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan.

12. Strategi Mendorong pola hidup bersih dan sehat di masyarakat melalui upaya promotif dan preventif

Strategi Mendorong pola hidup bersih dan sehat di masyarakat melalui upaya promotif dan preventif dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

a) Pemantauan kebersihan dan kesehatan makanan dan minuman di masyarakat
b) Promosi hidup sehat di masyarakat, rumah sakit dan Puskesmas

c) Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
d) Penyediaan pelayanan kesehatan khusus

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Upaya Kesehatan Masyarakat** dengan indikator, antara lain :

a) Persentase Masyarakat Yang Terlayani Pelayanan Khusus
b) Persentase sampel yang memenuhi syarat keamanan makanan olahan
c) Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam
d) Cakupan Kelurahan Yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)

Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Upaya Kesehatan Masyarakat** yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan.

Indikator dari Program Upaya Kesehatan Masyarakat, antara lain:

a) Persentase rumah sehat
b) Persentase TPM memenuhi syarat higienis sanitasi
c) Cakupan Kelurahan Yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)

13. Strategi Meningkatkan cakupan peserta KB Aktif

Strategi Meningkatkan cakupan peserta KB Aktif dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

a) Penyediaan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin di setiap fasilitas kesehatan milik Pemerintah
b) Peningkatan partisipasi peserta KB pria
c) Peningkatan kesadaran masyarakat peduli keluarga berencana
d) Pembinaan kader Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL)

Untuk arah kebijakan a) sampai dengan arah kebijakan c) pada tahun 2016 didukung oleh **Program Keluarga Berencana** dengan indikator persentase Pasangan Usia Subur yang ber-KB Aktif.

Pada tahun 2017-2021, untuk arah kebijakan a) sampai dengan arah kebijakan c) didukung oleh **Program Keluarga Berencana** yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan.

Indikator dari Program Keluarga Berencana, antara lain:

a) Persentase peserta KB baru
b) Persentase peserta KB aktif
c) Persentase peserta KB aktif yang *drop out* kontrasepsi
d) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (*unmeet need*)

Sedangkan, untuk arah kebijakan d) pada tahun 2016 didukung oleh **Program Bina Keluarga** dengan indikator persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif.

Pada tahun 2017-2021 untuk arah kebijakan d) didukung oleh **Program Bina Keluarga** yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui pembinaan kader kelompok bina keluarga.

Indikator dari Program Bina Keluarga, antara lain:

a) Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif
b) Persentase Pasangan Usia Subur yang Usia Istrinya Kurang dari 20 Tahun

14. Strategi Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pola pangan harapan dan keamanan pangan

Strategi Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pola pangan harapan dan keamanan pangan dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain :

a) Meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga
b) Membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)** dengan indikator :

a) Tersedianya Informasi Ketersediaan dan Distribusi Pangan
b) Tingkat Keamanan Produk Pangan

Sedangkan pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman dan Keamanan Pangan** yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Indikator dari Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman dan Keamanan Pangan, antara lain:

a) Tingkat keamanan bahan pangan segar yang beredar
b) Persentase *sample* yang memenuhi syarat keamanan makanan
c) Tingkat keanekaragaman konsumsi masyarakat (PPH)

15. Strategi Mengendalikan kestabilan harga dan pasokan

Strategi Mengendalikan kestabilan harga dan pasokan dilaksanakan melalui arah kebijakan Pemantauan perkembangan harga dan pasokan serta mengkoordinasikan operasi pasar.

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)** dengan indikator :

a) Tersedianya Informasi Ketersediaan dan Distribusi Pangan
b) Tingkat Keamanan Produk Pangan

Sedangkan pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan** yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Indikator dari Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan, antara lain:

a) Persentase pasar yang dipantau harganya
b) Tingkat frekuensi intervensi ketersediaan komoditas

16. Strategi Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas

Strategi Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

a) Menggiatkan organisasi kepemudaan di tingkat RW/Kelurahan (Karang Taruna) dengan konsep kekinian
b) Pendampingan pemuda menjadi agen perubahan bagi generasi muda di tingkat kota (pemuda pelopor)

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan** dengan indikator :

a) Akumulasi pemuda sebagai pelopor pembangunan
b) Cakupan pemuda yang mendapat pembinaan
c) Akumulasi pemuda yang dapat mengembangkan usaha mandiri

Sedangkan pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan** yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda.

Indikator dari Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan adalah persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja.

17. Strategi Meningkatkan prestasi pemuda di bidang olahraga

Strategi Meningkatkan prestasi pemuda di bidang olahraga dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

a) Pelaksanaan event kejuaraan olahraga skala kota secara rutin
b) Pemberian kesejahteraan bagi atlit
c) Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan prasarana olahraga

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga** dengan indikator :

a) Cakupan pembinaan atlet olahraga
b) Akumulasi prasarana olahraga yang dikembangkan
c) Akumulasi olahraga rekreasi yang digali, dibina dan dikembangkan di Kota Surabaya

Sedangkan pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga** yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda.

Indikator dari Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, antara lain:

a) Akumulasi atlet yang dibina dan berprestasi

b) Cakupan / sebaran fasilitas olahraga

18. Strategi Memperluas kesempatan kerja formal

Strategi Meningkatkan Memperluas kesempatan kerja formal dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

a) Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi
b) Pengembangan sistem informasi dan promosi ketenagakerjaan yang terintegerasi dan efektif
c) Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja, konseling dan *job matching* yang tepat
d) Fasilitasi kerjasama lembaga pendidikan, pelatihan dan pemberi kerja

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Peningkatan Kesempatan Kerja** dengan indikator Persentase pencari kerja terserap pada pasar kerja.

Sedangkan pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Peningkatan Kesempatan Kerja** yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk mengurangi pengangguran.

Indikator dari Program Peningkatan Kesempatan Kerja, antara lain:

a) Persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat diinformasikan
b) Persentase pemuda yang membuka wirausaha mandiri

19. Strategi Menumbuhkan wirausaha muda baru yang produktif

Strategi Menumbuhkan wirausaha muda baru yang produktif dilaksanakan melalui arah kebijakan Pelaksanaan pelatihan wirausaha bagi pemuda.

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Peningkatan Kesempatan Kerja** dengan indikator Persentase pencari kerja terserap pada pasar kerja.

Sedangkan pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Peningkatan Kesempatan Kerja** yang bertujuan untuk

meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk mengurangi pengangguran.

Indikator dari Program Peningkatan Kesempatan Kerja, antara lain:

a) Persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat diinformasikan
b) Persentase pemuda yang membuka wirausaha mandiri

20. Strategi Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja

Strategi Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

a) Sertifikasi tenaga kerja dan lulusan pelatihan
b) Fasilitasi akreditasi lembaga pelatihan
c) Pemasyarakatan budaya produktif dan etos kerja

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas** dengan indikator Persentase Angkatan Kerja yang Lulus sertifikasi.

Sedangkan pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas** yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk mengurangi pengangguran.

Indikator dari Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas, antara lain:

a) Persentase Angkatan Kerja yang Lulus sertifikasi
b) Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi yang lulus pelatihan

21. Strategi Menerapkan prinsip-prinsip hubungan industrial dalam pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Strategi Menerapkan prinsip-prinsip hubungan industrial dalam pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

a) Mendorong perusahaan memiliki Peraturan Kerja dan mengawasi penerapannya

b) Mendorong terwujudnya penetapan upah dan skala upah yang adil

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016-2021 didukung oleh **Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja** yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk mengurangi pengangguran.

Pada tahun 2016, indikator dari Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja adalah Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama.

Sedangkan pada tahun 2017-2021, indikator dari Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja adalah Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama.

22. Strategi Meningkatkan penerapan norma kerja (termasuk norma kerja perempuan dan anak) dan K3

Strategi Meningkatkan penerapan norma kerja (termasuk norma kerja perempuan dan anak) dan K3 dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

a) Peningkatan pemahaman norma kerja dan K3 serta pengawasan atas penerapannya
b) Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan** dengan indikator Persentase perusahaan yang mematuhi norma ketenagakerjaan dan/atau K3.

Sedangkan pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan** yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk mengurangi pengangguran.

Indikator dari Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan adalah Persentase perusahaan yang telah diperiksa dan mematuhi norma ketenagakerjaan dan/norma K3.

23. Strategi Meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen untuk penanganan PMKS

Strategi Meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen untuk penanganan PMKS dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

a) Peningkatan kualitas pelayanan dan sarana prasarana UPTD rehabilitasi kesejahteraan sosial
b) Pemberian kebutuhan dasar permakanan bagi korban bencana, lansia, anak yatim, piatu, yatim piatu dan penyandang cacat miskin dan terlantar
c) Penjangkauan dan pemulangan PMKS ke daerah asal
d) Pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin
e) Pemberdayaan dan pembinaan relawan sosial dan organisasi sosial

Untuk arah kebijakan a) sampai dengan arah kebijakan d) pada tahun 2016-2021 didukung oleh **Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial** yang bertujuan untuk meningkatkan penanganan PMKS.

Indikator dari Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial adalah Persentase PMKS yang ditangani.

Untuk arah kebijakan e), pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial** dengan indikator Persentase terfasilitasinya kegiatan keagamaan dan nilai-nilai kepahlawanan.

Sedangkan untuk arah kebijakan e), pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial** yang bertujuan untuk meningkatkan penanganan PMKS.

Indikator dari Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial adalah Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.

24. Strategi Membentuk kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat dan memantau serta mengembangkannya secara berkelanjutan

Strategi Membentuk kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat dan memantau serta mengembangkannya secara berkelanjutan dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

a) Pembentukan kelompok yang mewadahi PMKS usia produktif
b) Fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan ekonomi PMKS usia produktif hingga mampu berproduksi dan dapat dilimpahkan penanganannya ke Dinas Koperasi dan UMKM
c) Pengembangan hasil usaha kelompok
d) Mengoptimalkan fungsi kader pemberdayaan masyarakat
e) Peningkatan pembinaan dan pelatihan ketrampilan bagi PMKS

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat** dengan Indikator, antara lain:

a) Persentase pelaksanaan pemutakhiran data keluarga miskin
b) Persentase Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) yang berdaya

Sedangkan pada tahun tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat** yang bertujuan untuk menurunkan PMKS melalui pemberdayaan PMKS usia produktif dalam kelompok-kelompok usaha.

Indikator dari Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat adalah persentase PMKS usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi.

25. Strategi Meningkatkan akses, kontrol, partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Strategi Meningkatkan akses, kontrol, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

a) Penguatan kelembagaan dan jaringan PUG dan PUHA
b) Penyediaan data terpilah terkait potensi pengarusutamaan gender sebagai bahan pengambilan kebijakan yang responsif gender

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak** dengan indikator :

a) Persentase indikator Kota Layak Anak (KLA) yang terpenuhi
b) Persentase permasalahan Perempuan dan Anak yang ditangani
c) Persentase indikator Pengarusutamaan Gender (PUG) yang terpenuhi

Sedangkan pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan** yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak.

Indikator dari Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan adalah Persentase indikator PUG tingkat kecamatan yang terpenuhi.

26. Strategi Melindungi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan *trafficking* melalui pendampingan terhadap korban sekaligus mengembangkan upaya pencegahan tindak kekerasan dan *trafficking*

Strategi Melindungi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan *trafficking* melalui pendampingan terhadap korban sekaligus mengembangkan upaya pencegahan tindak kekerasan dan *trafficking* dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

a) Fasilitasi layanan mencakup mekanisme pelaporan, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan *trafficking* (pelaku, korban, saksi)
b) Pemberian bantuan hukum bagi anak yang terlibat tindak kekerasan
c) Pemberdayaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTP2A) dalam kerjasama dengan lembaga, masyarakat dan dunia usaha

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak** dengan indikator :

a) Persentase indikator Kota Layak Anak (KLA) yang terpenuhi
b) Persentase permasalahan Perempuan dan Anak yang ditangani
c) Persentase indikator Pengarusutamaan Gender (PUG) yang terpenuhi

Sedangkan pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Perlindungan Perempuan dan Anak** yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak.

Indikator dari Program Perlindungan Perempuan dan Anak, antara lain:

a) Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani
b) Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A)
c) Persentase jejaring yang berperan dalam penanganan permasalahan terhadap perempuan dan anak
d) Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan

27. Strategi Meningkatkan ketertiban umum dengan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah

Strategi Meningkatkan ketertiban umum dengan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

a) Penyiapan tenaga penertiban
b) Peningkatan kapasitas personil penertiban dengan pembinaan pasca pendidikan
c) Peningkatan intensitas pengawasan dalam menertibkan kota
d) Penindakan dan evaluasi pelanggaran Perda

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 di dukung oleh **Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal** dengan indikator Persentase tertanganinya kasus pelanggaran peraturan.

Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Penegakan Peraturan Daerah** yang bertujuan untuk

meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah.

Indikator dari Program Penegakan Peraturan Daerah, antara lain :

a) Persentase pelanggaran Perda terkait reklame yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti
b) Persentase pelanggaran Perda terkait HO, IMB, Kebersihan, Parkir Umum, Perda Lainnya yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti
c) Persentase pelanggaran Perda terkait PKL, PSK, Anjal dan Gepeng, Rekreasi Hiburan Umum yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti
d) Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum

28. Strategi Meningkatkan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan serta mewujudkan kerukunan hidup bermasyarakat

Strategi Meningkatkan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan serta mewujudkan kerukunan hidup bermasyarakat dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

a) Pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat
b) Peningkatan kerjasama dan pengendalian di bidang keamanan
c) Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan terhadap kader wasbang
d) Peningkatan intensitas kegiatan yang mendukung perilaku toleransi dan kerukunan beragama
e) Pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan
f) Pemantauan orang asing, organisasi kemasyarakatan asing dan tenaga kerja asing

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 di dukung oleh **Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan** dengan indikator persentase tertanganinya konflik di masyarakat.

Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan**

Lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah.

Indikator dari Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan, antara lain: Persentase tertanganinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum dan Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dan difasilitasi yang berjalan dengan lancar.

29. Strategi Menyelesaikan penyusunan seluruh rencana induk sektoral

Strategi Menyelesaikan penyusunan seluruh rencana induk sektoral dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

a) Penyusunan dan pemutakhiran rencana induk sektoral berbasis teknologi informasi
b) Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk koordinasi dalam perencanaan sektoral

Arah kebijakan diatas pada tahun 2016 didukung oleh **Program Penataan Ruang** dengan indikator proporsi luas area yang telah terlayani sistem informasi rencana tata ruang kota.

Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Perencanaan Ruang Kota** yang bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi sistem penataan ruang dan sistem pertanahan.

Indikator dari Program Perencanaan Ruang Kota, antara lain:

a) Persentase rencana induk sektoral yang disusun
b) Persentase rencana rinci tata ruang yang disusun

30. Strategi Menyelesaikan penyusunan seluruh rencana rinci tata ruang kota yang terintegrasi baik dalam skala lokal maupun regional

Strategi Menyelesaikan penyusunan seluruh rencana rinci tata ruang kota yang terintegrasi baik dalam skala lokal maupun regional dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

a) Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk koordinasi dalam perencanaan rinci tata ruang kota
b) Penetapan seluruh rencana rinci tata ruang kota secara bertahap
c) Peningkatan upaya integrasi sistem perencanaan tata ruang berbasis TIK

Untuk ketiga arah kebijakan diatas pada tahun 2016 didukung oleh **Program Penataan Ruang** dengan indikator proporsi luas area yang telah terlayani sistem informasi rencana tata ruang kota.

Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Perencanaan Ruang Kota** yang bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi sistem penataan ruang dan sistem pertanahan.

Indikator dari Program Perencanaan Ruang Kota, antara lain:

a) Persentase rencana induk sektoral yang disusun
b) Persentase rencana rinci tata ruang yang disusun

31. Strategi Optimalisasi penataan ruang melalui pengendalian pemanfaatan ruang

Strategi Optimalisasi penataan ruang melalui pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

a) Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk koordinasi dalam pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota
b) Pemanfaatan aplikasi berbasis TIK yang terintegrasi untuk pelayanan perizinan
c) Penerapan sistem *reward* dan *punishment* dalam membangun kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi perizinan bangunan

Untuk ketiga arah kebijakan diatas pada tahun 2016 didukung oleh **Program Penataan Ruang** dengan indikator proporsi luas area yang telah terlayani sistem informasi rencana tata ruang kota.

Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota** yang bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi sistem penataan ruang dan sistem pertanahan.

Indikator dari Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota, antara lain:

a) Persentase jumlah bangunan yang ber IMB
b) Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB

32. Strategi Meningkatkan pemenuhan kebutuhan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum

Strategi Meningkatkan pemenuhan kebutuhan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui arah kebijakan Peningkatan upaya percepatan pengadaan lahan melalui koordinasi lintas sektor dan pendekatan persuasif kepada masyarakat.

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum** dengan indikator Luas tanah dan / atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum** yang bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi sistem penataan ruang dan sistem pertanahan.

Indikator dari Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, antara lain:

a) Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum
b) Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum

33. Strategi Mengoptimalkan sistem manajemen pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Kota Surabaya

Strategi Mengoptimalkan sistem manajemen pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Kota Surabaya dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

a) Peningkatan upaya pengamanan aset melalui pengamanan administrasi, fisik, pemanfaatan dan hukum
b) Pemantauan dan pemutakhiran data aset tanah dan/atau bangunan secara berkala melalui *database* yang terintegrasi

Untuk kedua arah kebijakan diatas pada tahun 2016 didukung oleh **Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota** dengan indikator Rasio aset pemkot yang tersertifikat.

Pada tahun 2017-2021, untuk arah kebijakan a) didukung oleh **Program Pengamanan Aset** yang bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi sistem penataan ruang dan sistem pertanahan.

Indikator dari Program Pengamanan Aset, antara lain:

a) Persentase tanah aset yang telah dilakukan pemagaran, papan, patok
b) Persentase tanah aset yang tersertifikasi
c) Persentase kasus tanah dan/ atau bangunan yang ditangani

Sedangkan, untuk arah kebijakan b) didukung oleh **Program Pengelolaan Aset** yang bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi sistem penataan ruang dan sistem pertanahan.

Indikator dari Program Pengelolaan Aset adalah Persentase aset tanah dan/atau bangunan yang tercatat pemanfaatannya.

34. Strategi Mengoptimalkan pengelolaan RTH yang sudah dikuasai Pemerintah Kota Surabaya

Strategi Mengoptimalkan pengelolaan RTH yang sudah dikuasai Pemerintah Kota Surabaya dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

a) Optimalisasi UPTD dan/atau rayon yang secara khusus menangani pengelolaan RTH
b) Penyediaan kecukupan anggaran pembangunan, operasional dan pemeliharaan dalam rangka peningkatan penyediaan RTH

Kedua arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)** dengan indikator Persentase Luas RTH yang berfungsi optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang ada.

Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau** yang

bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau.

Indikator dari Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau, antara lain:

a) Persentase pertumbuhan luas RTH yang dipelihara dan diawasi
b) Persentase luas RTH yang dibangun dan ditingkatkan fungsinya

35. Strategi Mengoptimalkan fungsi fasilitas pengelolaan sampah

Strategi Mengoptimalkan fungsi fasilitas pengelolaan sampah dilaksanakan melalui arah kebijakan Peningkatan pemanfataan fasilitas pengelolaan sampah berteknologi tepat guna dan ramah lingkungan.

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pengelolaan Kebersihan Kota** dengan indikator:

a) Jumlah Sampah Yang Dikelola di TPA
b) Rata - rata Jumlah Sampah Yang Diangkut dari TPS
c) Cakupan Layanan Kebersihan

Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Pengelolaan Kebersihan** yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau.

Indikator Program Pengelolaan Kebersihan, antara lain:

a) Persentase pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R
b) Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan
c) Persentase pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yang ≤ 1 hari

36. Strategi Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan

Strategi Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain :

a) Peningkatan peran serta sekolah dan kantor swasta dalam pengendalian sampah

b) Peningkatan pengelolaan sampah berbasis 3R di tingkat RT/RW dan Kelurahan secara berkala

Kedua arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pengelolaan Kebersihan Kota** dengan indikator:

a) Jumlah Sampah Yang Dikelola di TPA
b) Rata - rata Jumlah Sampah Yang Diangkut dari TPS
c) Cakupan Layanan Kebersihan

Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Pengelolaan Kebersihan** yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau.

Indikator dari Program Pengelolaan Kebersihan, antara lain:

a) Persentase pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R
b) Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan
c) Persentase pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yang ≤ 1 hari

37. Strategi Pengendalian pencemaran air dan udara skala kota

Strategi Pengendalian pencemaran air dan udara skala kota dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain :

a) Pemantauan dan penegakan aturan tentang pengendalian pencemaran air dan udara terutama pada sektor industri dan komersial
b) Optimalisasi pemanfaatan stasiun monitoring udara ambient
c) Pemantauan pengendalian pencemaran limbah domestik di perumahan dan kawasan permukiman
d) Peningkatan kualitas air permukaan untuk mendukung ketersediaan air baku

Keempat arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup** dengan indikator:

a) Tingkat kualitas air limbah industri BOD
b) Tingkat kualitas air limbah industri COD

c) Tingkat kualitas air limbah industri TSS.
d) Tingkat kualitas air limbah Rumah sakit BOD
e) Tingkat kualitas air limbah Rumah sakit COD
f) Tingkat kualitas air limbah Rumah sakit TSS
g) Tingkat kualitas air limbah Domestik BOD
h) Tingkat kualitas air limbah Domestik TSS
i) Tingkat kualitas air limbah Hotel BOD
j) Tingkat kualitas air limbah Hotel COD
k) Tingkat kualitas air limbah Hotel TSS
l) Tingkat kualitas Udara Emisi di Industri SO_2
m) Tingkat kualitas Udara Emisi di Industri NO_2

Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan** yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau.

Indikator dari Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan adalah Persentase ketaatan/kepatuhan terhadap aspek lingkungan.

38. Strategi Memantau secara berkesinambungan dan memutakhirkan sistem mitigasi dan penanggulangan bencana skala kota

Strategi Memantau secara berkesinambungan dan memutakhirkan sistem mitigasi dan penanggulangan bencana skala kota dilakukan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain :

a) Peningkatan kecakapan masyarakat dan petugas dalam penanggulangan bencana
b) Peningkatan sistem manajemen resiko dan mitigasi bencana non alam melalui upaya optimalisasi rekomendasi dan pemantauan berkala proteksi kebakaran pada bangunan dan kawasan permukiman
c) Penyediaan sarana/akses untuk kemudahan penanggulangan bencana

d) Peningkatan sistem mitigasi dalam upaya mendukung pengelolaan tanggap darurat bencana
e) Peningkatan upaya integrasi antar stakeholder dalam pengelolaan tanggap darurat bencana

Keenam arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran** dengan indikator:

a) Persentase pemenuhan kebutuhan jumlah sarana prasarana kebakaran eksisting dibanding kebutuhan ideal
b) Jumlah penduduk Surabaya yang memiliki pengetahuan mengenai pencegahan dan penanganan kebakaran
c) Pencapaian waktu tanggap kurang dari 15 menit

Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Penanggulangan Bencana** yang bertujuan untuk mewujudkan sistem ketahanan yang handal terhadap bencana.

Indikator dari Program Penanggulangan Bencana, antara lain:

a) Angka kejadian kebakaran gedung/bangunan per 1 juta penduduk Surabaya
b) Angka kejadian kebakaran non bangunan per 1 juta penduduk Surabaya
c) Persentase waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit
d) Persentase waktu tanggap ≤ 24 jam penanggulangan kejadian bencana alam
e) Persentase kelurahan tangguh bencana

39. Strategi Menyediakan rumah layak huni dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman

Strategi Menyediakan rumah layak huni dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain :

a) Pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah
b) Pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan sistem setempat
c) Peningkatan sarana prasarana perumahan dan kawasan permukiman

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Perumahan dan Permukiman** dengan indikator, antara lain:

a) Luas kawasan perumahan permukiman yang mendapat peningkatan layanan sarana prasarana
b) Jumlah MBR yang telah mendapatkan rumah layak huni

Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Perumahan dan Kawasan Permukiman** yang bertujuan untuk Memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas.

Indikator dari Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, antara lain:

a) Persentase rumah tinggal tapak tidak layak huni yang diperbaiki
b) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni
c) Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya
d) Persentase Pelayanan Sanitasi Permukiman

40. Strategi Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif

Strategi Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif dilaksanakan melalui arah kebijakan Peningkatan upaya penerapan upaya pengembangan energi alternatif di gedung milik pemerintah.

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi** dengan indikator jumlah pengusahaan energi baru dan terbarukan yang dikembangkan.

Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif** yang bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan.

Indikator dari Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif, antara lain:

a) Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan
b) Akumulasi entitas lingkungan yang berperan serta dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif

41. Strategi Memasyarakatkan penggunaan energi alternatif kepada seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha

Strategi Memasyarakatkan penggunaan energi alternatif kepada seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain :

a) Optimalisasi penggunaan sumber energi alternatif terbarukan yang telah diterapkan pemerintah kota
b) Meningkatkan bentuk kerjasama dengan berbagai institusi serta pendampingan kepada masyarakat untuk pengembangan penerapan energi alternatif
c) Pengembangan sistem kompensasi (insentif) bagi pelaku usaha yang memanfaatkan sumber energi alternatif

Untuk ketiga arah kebijakan diatas pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi** dengan indikator jumlah pengusahaan energi baru dan terbarukan yang dikembangkan.

Pada tahun 2017-2021, ketiga arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif** yang bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan.

Indikator dari Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif, antara lain:

a) Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan
b) Akumulasi entitas lingkungan yang berperan serta dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif

42. Strategi Menumbuhkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk hemat energi

Strategi Menumbuhkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk hemat energi dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain :

a) Pengembangan kerjasama dengan instansi terkait untuk peralihan penggunaan sumber energi di masyarakat
b) Pelaksanaan audit energi dan pendampingan penerapan konservasi energi

Untuk kedua arah kebijakan diatas pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi** dengan indikator jumlah pengusahaan energi baru dan terbarukan yang dikembangkan.

Pada tahun 2017-2021, kedua arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Upaya Konservasi Energi** yang bertujuan untuk Meningkatkan upaya konservasi energi.

Indikator dari Program Upaya Konservasi Energi adalah Akumulasi kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi.

43. Strategi Menggali potensi dan menetapkan budaya lokal

Strategi Menggali potensi dan menetapkan budaya lokal dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

a) Menggali potensi budaya lokal
b) Menetapkan budaya lokal serta bangunan bersejarah sebagai ikon Kota Surabaya
c) Peningkatan kompetensi SDM di bidang budaya melalui forum pelaku budaya lokal

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pengelolaan Kekayaan Budaya** dengan indikator persentase bangunan dan situs cagar budaya yang terawat dengan baik.

Pada tahun 2017-2012, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program perlindungan budaya lokal** yang bertujuan untuk melestarikan budaya lokal.

Indikator Program perlindungan budaya lokal adalah persentase cagar budaya yang terpelihara.

44. Strategi Mengembangkan budaya lokal dengan cara mengenalkan dan menampilkan budaya lokal kepada masyarakat sehingga bisa dimanfaatkan sebagai tujuan pariwisata

Strategi mengembangkan budaya lokal dengan cara mengenalkan dan menampilkan budaya lokal kepada masyarakat sehingga bisa dimanfaatkan sebagai tujuan pariwisata dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

a) Meningkatkan kualitas penampilan kelompok-kelompok budaya lokal
b) Mendorong sektor-sektor usaha penunjang pariwisata (hotel dan restoran) untuk menampilkan kelompok-kelompok budaya lokal

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh 2 program yaitu **Program Pengelolaan Keragaman Budaya** dengan indikator persentase kelompok seni dan budaya yang difasilitasi dan **Program Pengelolaan Kekayaan Budaya** dengan indikator persentase bangunan dan situs cagar budaya yang terawat dengan baik**.**

Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal** yang bertujuan untuk melestarikan budaya lokal.

Indikator program pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal lokal, antara lain:

a) Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil
b) Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 17 lokasi

45. Strategi Meningkatkan akses baca melalui penambahan layanan baca dan koleksi buku serta peningkatan kualitas layanan baca

Strategi meningkatkan akses baca melalui penambahan layanan baca dan koleksi buku serta peningkatan kualitas layanan baca dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

a) Penambahan koleksi buku di layanan baca

b) Menambah jumlah dan meningkatkan kualitas layanan baca
c) Meningkatkan pembinaan terhadap petugas pengelola layanan baca
d) Mengintegrasi sistem informasi perpustakaan

Arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan** yang bertujuan untuk meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat.

Indikator Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan pada tahun 2016 adalah rata-rata kunjungan layanan baca per bulan.

Sedangkan indikator Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan pada tahun 2017-2021, antara lain:

a) Persentase pertumbuhan *event* literasi yang diselenggarakan
b) Persentase koleksi buku
c) Persentase siswa yang terlibat dalam tes *reading text levelling*
d) Persentase perpustakaan yang berhasil dibina

46. Strategi Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat

Strategi Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

a) Meningkatkan *event* pustaka untuk meningkatkan minat baca masyarakat
b) Mengevaluasi kemampuan literasi siswa

Arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan** yang bertujuan untuk meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat.

Indikator Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan pada tahun 2016 adalah rata-rata kunjungan layanan baca per bulan.

Sedangkan indikator Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan pada tahun 2017-2021, antara lain:

a) Persentase pertumbuhan *event* literasi yang diselenggarakan
b) Persentase koleksi buku
c) Persentase siswa yang terlibat dalam tes *reading text levelling*

a) Persentase perpustakaan yang berhasil dibina

47. Strategi Meningkatkan jumlah warga masyarakat yang memiliki wawasan dan karakter kebangsaan

Strategi Meningkatkan jumlah warga masyarakat yang memiliki wawasan dan karakter kebangsaan dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

a) Bekerjasama dengan institusi pendidikan membangun nilai-nilai dan karakter kebangsaan bagi pelajar melalui kegiatan akademis maupun ekstrakurikuler
b) Mengkomunikasikan dan menumbuhkan nilai-nilai dan karakter kebangsaan kepada warga masyarakat melalui sosialisasi dan pengadaan *event* peningkatan nilai kebangsaan

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan** dengan indikator persentase tertanganinya konflik di masyarakat.

Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Pengembangan Wawasan Dan Karakter Kebangsaan Dalam Konteks Budaya Lokal** yang bertujuan untuk memantapkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan generasi muda.

Indikator Program Pengembangan Wawasan Dan Karakter Kebangsaan Dalam Konteks Budaya Lokal, yaitu :

a) Persentase partisipasi peserta dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan
b) Persentase kader wawasan kebangsaan

48. Strategi Membangun dan mengembangkan simpul pusat kegiatan logistik kota baik dalam skala pelayanan lokal, regional dan nasional

Strategi Membangun dan mengembangkan simpul pusat kegiatan logistik kota baik dalam skala pelayanan lokal, regional dan nasional pada tahun 2016 belum ditetapkan dan dengan mempertimbangkan perkembangan dan dinamika lingkungan saat ini, maka pada tahun 2017-2021 dilaksanakan beberapa arah kebijakan, antara lain:

a) Meningkatkan akses/sarana dan prasana pendukung menuju simpul kegiatan logistik dan distribusi dalam kota
b) Pengembangan sistem informasi dan manajemen rantai pasok (*supply chain management*) yang diperlukan untuk mengintegrasikan komponen-komponen dan kegiatan-kegiatan dalam sistem logistik

Arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Pengembangan Hub dan Simpul Logistik untuk Mendukung Distribusi Komoditas Potensial, Program Manajemen Lalu Lintas Angkutan Barang,** dan **Program Peningkatan Investasi Fasilitas Pendukung Logistik** yang bertujuan untuk meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau dari dan menuju Surabaya.

Indikator dari Program Pengembangan Hub dan Simpul Logistik untuk Mendukung Distribusi Komoditas Potensial, antara lain :

a) Persentase realisasi pengembangan hub dan simpul logistik
b) Tingkat kelengkapan data gudang terdaftar

Indikator dari Program manajemen lalu lintas angkutan barang adalah rata-rata waktu tempuh kendaraan barang dari dan menuju hub.

Sedangkan, indikator dari Program Peningkatan Investasi Fasilitas Pendukung Logistik adalah tingkat pertumbuhan investasi fasilitas pendukung logistik.

49. Strategi Meningkatkan realisasi kerjasama bidang perdagangan atas MoU yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Surabaya dengan pihak yang bekerjasama

Strategi meningkatkan realisasi kerjasama bidang perdagangan atas MoU yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Surabaya dengan pihak yang bekerjasama pada tahun 2016 belum ditetapkan dan dengan mempertimbangkan perkembangan dan dinamika lingkungan saat ini, maka pada tahun 2017-2021 dilaksanakan beberapa arah kebijakan, antara lain:

a) Penyepakatan bidang yang dikerjasamakan dan bentuk lembaga kerjasama beserta deskripsi tugas

b) Pelaksanaan pemasaran dan promosi obyek kerjasama secara bersama-sama
c) Harmonisasi regulasi bersama yang mengatur implementasi program kerjasama di bidang perdagangan
d) Koordinasi dan dukungan dari Pemerintah Pusat dalam hal instrumen peraturan ekspor-impor; pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktek perdagangan illegal dan proteksi untuk produk dalam negeri
e) Pemusatan kegiatan ekonomi di wilayah tertentu untuk menghasilkan keuntungan bersama, memperpendek mata rantai perdagangan, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penciptaan efisiensi perdagangan

Arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Kerjasama Bidang Perdagangan** yang bertujuan untuk meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau dari dan menuju Surabaya.

Indikator dari Program Kerjasama Bidang Perdagangan, antara lain :

a) Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan yang telah ditandatangani
b) Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan tertandatangani yang telah terealisasi

50. Strategi Meningkatkan Kedisiplinan Aparatur

Strategi meningkatkan kedisiplinan aparatur dilaksanakan melalui arah kebijakan pengendalian kedisiplinan aparatur dengan sistem berbasis teknologi.

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH** dengan indikator :

a) Persentase penanganan pengaduan
b) Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal** yang bertujuan

untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator dari Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal, antara lain:

a) Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah I
b) Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah II
c) Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah III
d) Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah I
e) Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah II
f) Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah III

51. Strategi Meningkatkan Kualitas Belanja dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Strategi meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui arah kebijakan pengendalian pengelolaan keuangan secara administratif.

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH** dengan indikator :

a) Persentase penanganan pengaduan
b) Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal** yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator dari Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal, antara lain:

a) Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah I
b) Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah II
c) Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah III
d) Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah I
e) Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah II
a) Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah III

52. Strategi Menempatkan Aparatur sesuai Kapasitas dan Kompetensi, serta Melakukan Evaluasi atas Kompetensi secara Berkelanjutan

Strategi menempatkan aparatur sesuai kapasitas dan kompetensi, serta melakukan evaluasi atas kompetensi secara berkelanjutan dilaksanakan melalui arah kebijakan pemanfaatan *assessment center* sebagai sarana pengelolaan kompetensi aparatur. Strategi tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** dengan indikator:

a) Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural
b) Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional
c) Persentase data pada sistem kepegawaian yang *up date*

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator dari Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, antara lain:

a) Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural
b) Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional
c) Persentase terbentuknya dan berfungsinya *assessment centre*
d) Persentase aparatur yang memiliki kinerja baik

53. Strategi Meningkatkan Efektivitas dan Kinerja Lembaga Pemerintahan melalui Peningkatan Penatalaksanaan, Tata Kelola Administrasi dan Kearsipan, Kerjasama, Penyediaan Sarana dan Prasarana, Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan, serta Regulasi untuk Mendukung Pelayanan Publik yang Baik

Strategi meningkatkan efektivitas dan kinerja lembaga pemerintahan melalui peningkatan penatalaksanaan, tata kelola administrasi dan kearsipan, kerjasama, penyediaan sarana dan prasarana, perencanaan dan pengendalian pembangunan, serta regulasi untuk mendukung pelayanan publik yang baik dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

a) Melakukan tinjauan terhadap kesesuaian lembaga beserta tugas pokok dan fungsinya
b) Mengoptimalkan penyelenggaraan ketatalaksanaan
c) Meningkatkan peran Kecamatan dan Kelurahan untuk menyediakan data pemerintahan secara tertib administrasi
d) Memanfaatkan teknologi untuk penataan, penyelamatan dan pelestarian arsip
e) Melakukan kajian dan analisis untuk rekomendasi kebijakan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan
f) Meningkatkan respon dan adaptasi dalam fasilitasi kegiatan DPRD
g) Membuat mekanisme analisa kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi
h) Meningkatkan respon dan adaptasi dalam fasilitasi kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
i) Membuat mekanisme analisa kebutuhan dan ketersediaan administrasi perkantoran
j) Meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
k) Meningkatkan pemahaman SKPD terhadap produk perencanaan pembangunan yang partisipatif
l) Pemanfaatan teknologi untuk mengendalikan pelaksanaan pembangunan
m) Melakukan harmonisasi dan simplifikasi produk hukum secara rutin
n) Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan daerah untuk mendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

Untuk arah kebijakan a) dan b) pada tahun 2016 didukung oleh **Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan** dengan indikator:

a) Persentase SKPD yang tidak terjadi tumpang tindih pada tugas pokok dan fungsinya
b) Persentase jenis pelayanan yang memiliki SOP

Untuk arah kebijakan a) dan b) pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan** yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator dari Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, antara lain:

a) Persentase Standar Pelayanan (SP), yang di dalamnya mencakup proses bisnis, yang tersusun
b) Persentase Pendampingan Penyusunan POS (Prosedur Operasional Standar) SKPD
c) Persentase Prosedur Operasional Standar (POS) dan Standar Pelayanan (SP) Perangkat Daerah yang dievaluasi
d) Persentase Perangkat Daerah (PD) yang dilakukan evaluasi kelembagaan

Untuk arah kebijakan c) pada tahun 2016-2021 didukung oleh **Program Penataan Daerah Otonom** yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Pada tahun 2016, indikator dari Program Penataan Daerah Otonom adalah persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi.

Sedangkan pada tahun 2017-2021, indikator dari Program Penataan Daerah Otonom, yaitu :

a) Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update
b) Persentase nama rupabumi yang memenuhi syarat untuk diajukan pembakuan

Untuk arah kebijakan d) pada tahun 2016 didukung oleh **Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah** dengan indikator persentase SKPD dan unit kerja yang diakuisisi dokumen arsip dan **Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan** dengan indikator persentase SKPD dan unit kerja yang tertib sistem tata kearsipan.

Untuk arah kebijakan d) pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Penataan, Penyelamatan, dan Pelestarian Dokumen/Arsip**

Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator dari Program Penataan, Penyelamatan, dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah, antara lain:

a) Persentase jumlah arsip yang diakuisisi
b) Persentase perangkat daerah, unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan

Untuk arah kebijakan e) pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah** dengan indikator:

a) Persentase BUMD yang berkinerja sesuai standar
b) Persentase kajian/rekomendasi terkait perekonomian yang termanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan

Untuk arah kebijakan e) pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah** yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator dari Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, antara lain :

a) Persentase kajian/rekomendasi di sektor kesejahteraan rakyat yang termanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan
b) Persentase kajian/rekomendasi terkait perekonomian yang termanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan

Untuk arah kebijakan f) pada tahun 2016 didukung oleh **Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah** dengan indikator persentase jumlah kegiatan DPRD yang terfasilitasi dengan baik.

Untuk arah kebijakan f) pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Peningkatkan Kapasitas Lembaga Fasilitator Perwakilan Rakyat Daerah** yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator dari Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Fasilitator Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu :

a) Persentase kegiatan DPRD terkait rapat dan perundang-undangan yang terfasilitasi
b) Persentase kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang terfasilitasi

Untuk arah kebijakan g) pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan indikator, antara lain:

a) Persentase pemanfaatan barang sesuai dengan rencana
b) Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik

Selain itu, arah kebijakan g) pada tahun 2016 juga didukung oleh **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan indikator indeks kepuasan karyawan terhadap program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Untuk arah kebijakan g) pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan** yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator dari Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan, antara lain:

a) Persentase pemanfaatan aset
b) Persentase sistem informasi pemerintah kota surabaya yang diintegrasikan dengan sistem informasi barang daerah
c) Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik
d) Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik
e) Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
f) Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran

Untuk arah kebijakan h) pada tahun 2016 didukung oleh **Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah** dengan indikator persentase terlayaninya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar.

Untuk arah kebijakan h) pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah**

yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator dari Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah adalah persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar.

Untuk arah kebijakan i) pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan indikator indeks kepuasan karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Untuk arah kebijakan i) pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah adalah tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran.

Untuk arah kebijakan j) pada tahun 2016 didukung oleh **Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah** dengan indikator:

a) Persentase MoU kerjasama antar daerah dan pihak ketiga yang memberikan manfaat
b) Persentase MoU kerjasama luar negeri yang memberikan manfaat
c) Persentase MoU yang Dievaluasi

Untuk arah kebijakan j) pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah** yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator dari Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, antara lain:

a) Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti
b) Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) luar negeri yang ditindaklanjuti
c) Persentase MoU kerjasama (non perdagangan) yang Dievaluasi

Untuk arah kebijakan k) pada tahun 2016 didukung oleh **Program Perencanaan Pembangunan Daerah** dengan indikator:

a) Persentase kualitas penyusunan perencanaan strategis
b) Persentase kualitas monitoring dan evaluasi

Untuk arah kebijakan k) pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Perencanaan Pembangunan Daerah** yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator dari Program Perencanaan Pembangunan Daerah, antara lain:

a) Persentase PD lingkup bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas
b) Persentase PD lingkup bidang fisik dan prasarana yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas
c) Persentase PD lingkup bidang ekonomi yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas
d) Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral

Untuk arah kebijakan l) pada tahun 2016 didukung oleh **Program Perencanaan Pembangunan Daerah** dengan indikator:

a) Persentase kualitas penyusunan perencanaan strategis
b) Persentase kualitas monitoring dan evaluasi

Selain itu, arah kebijakan l) pada tahun 2016 juga didukung oleh **Program Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah** dengan indikator:

a) Peningkatan Kinerja BUMD
b) Termanfaatkannya Hasil Monev atau Kajian Sebagai Dasar Kebijakan/Keputusan

Untuk arah kebijakan l) pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Pengendalian Pembangunan Daerah** yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator dari Program Pengendalian Pembangunan Daerah, antara lain:

a) Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan di aspek waktu
b) Tingkat capaian keberhasilan kegiatan di aspek *output*

Untuk arah kebijakan m) pada tahun 2016 didukung oleh **Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan** dengan indikator:

a) Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan
b) Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti
c) Persentase Produk hukum yang disebarluaskan

Untuk arah kebijakan m) pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan** yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator dari Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, antara lain:

a) Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan
b) Persentase produk hukum daerah yang dievaluasi
c) Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti
d) Persentase produk hukum yang disebarluaskan

Untuk arah kebijakan n) pada tahun 2016 belum ditetapkan dan dengan mempertimbangkan perkembangan dan dinamika lingkungan saat ini, maka pada tahun 2017-2021 arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik** yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator dari Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik adalah rata-rata toleransi (*margin of error*) pada data-data terkait perhitungan indikator kinerja dalam RPJMD.

54. Strategi Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi Kependudukan Skala Kota sebagai Basis Pelayanan Dasar kepada Masyarakat dan sebagai Rekomendasi/Bahan Evaluasi Implementasi Kebijakan

Strategi meningkatkan kualitas data dan informasi kependudukan skala kota sebagai basis pelayanan dasar kepada masyarakat dan sebagai rekomendasi/bahan evaluasi implementasi kebijakan

dilaksanakan melalui arah kebijakan pengembangan *database* kependudukan secara terpadu serta pemutakhiran data secara berkesinambungan yang melibatkan seluruh instansi terkait di Pemerintah Kota.

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Penataan Administrasi Kependudukan** dengan indikator:

a) Persentase ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)
b) Cakupan penerbitan akte kelahiran (berdasarkan data SIAK)
c) Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP dan KK)
d) Cakupan penerbitan akte kematian (berdasarkan data SIAK)
e) Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Penataan Administrasi Kependudukan** yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator dari Program Penataan Administrasi Kependudukan, antara lain:

a) Persentase ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)
b) Cakupan penerbitan akte kelahiran (berdasarkan data SIAK)
c) Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP dan KK)
d) Cakupan penerbitan akte kematian (berdasarkan data SIAK)
e) Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)
f) Persentase jenis data kependudukan yang dimanfaatkan
g) Persentase sistem pelayanan publik berbasis SIAK
h) Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan

55. Strategi Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan

Strategi Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain :

a) Penyederhanaan proses perizinan dan non perizinan melalui pelayanan terpadu.
b) Penyediaan infrastruktur pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis teknologi informasi (*Surabaya Single Window*)

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi** dengan indikator persentase meningkatnya jumlah realisasi ijin penunjang investasi.

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan** yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator dari Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan.

56. Strategi Menyediakan layanan publik berbasis teknologi informasi

Strategi menyediakan layanan publik berbasis teknologi informasi dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain :

a) Pengembangan *masterplan* pembangunan aplikasi pelayanan publik administratif.
b) Pengendalian keamanan data dan informasi layanan (aplikasi, data, jaringan, perangkat keras)

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi** dengan indikator persentase layanan publik yang berbasis TIK.

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi** yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator dari Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, yaitu :

a) Persentase layanan publik administratif yang berbasis TIK
b) Persentase pengelolaan jaringan telekomunikasi pendukung pelayanan publik

57. Strategi Menyediakan saluran komunikasi dan informasi yang memadai bagi masyarakat dan pihak berkepentingan berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pembangunan skala kota

Strategi menyediakan saluran komunikasi dan informasi yang memadai bagi masyarakat dan pihak berkepentingan berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pembangunan skala kota dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain :

a) Mengembangkan komunikasi dan dialog langsung antara masyarakat dengan pimpinan pemerintah kota terkait program-program pembangunan
b) Menyediakan sarana dan saluran informasi publik melalui berbagai media
c) Menjalin komunikasi dengan pihak media massa untuk memberikan informasi positif tentang implementasi kebijakan dan pembangunan daerah

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Komunikasi dan Publikasi Masyarakat** dengan indikator persentase berita positif Pemerintah Kota Surabaya yang diinformasikan kepada masyarakat dan **Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa** dengan indikator:

a) Rata-rata kunjungan per bulan pada website www.surabaya.go.id
b) Angka partisipasi masyarakat pada kegiatan-kegiatan diseminasi informasi

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat** yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator dari Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat, antara lain :

a) Persentase berita positif Pemerintah Kota Surabaya yang terinformasikan kepada masyarakat
b) Rata-rata pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya

58. Strategi Memberikan perlindungan kepada konsumen serta menjamin keamanan perdagangan

Strategi Memberikan perlindungan kepada konsumen serta menjamin keamanan perdagangan dilaksanakan melalui beberapa strategi, antara lain :

a) Pengawasan barang beredar terutama terhadap barang-barang strategis, obat dan makanan.
b) Pemberian edukasi kepada konsumen melalui koordinasi dengan lembaga perlindungan konsumen
c) Meningkatkan jumlah dan kompetensi aparatur metrologi legal
d) Penambahan cakupan Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang diawasi
e) Pengelolaan laboratorium metrologi legal

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan** dengan indikator:

a) Persentase peningkatan jumlah tempat usaha perdagangan yang tertib ukur
b) Persentase peningkatan jumlah Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang tertib ukur

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan** yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator dari Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan adalah persentase temuan yang ditindaklanjuti.

59. Strategi Mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, terutama dari pajak dan retribusi daerah

Strategi mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, terutama dari pajak dan retribusi daerah dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

a) Pengembangan sistem pemungutan pajak yang transparan dan efisien
b) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga keuangan dan instansi terkait lainnya
c) Mendorong peningkatan kesadaran wajib pajak
d) Meningkatkan kualitas pendataan dan penetapan pajak
e) Meningkatkan kinerja BUMD untuk mendukung kemandirian keuangan daerah
f) Pengendalian pengelolaan anggaran dengan sistem berbasis teknologi

Untuk arah kebijakan a) sampai dengan arah kebijakan d), pada tahun 2016 didukung oleh **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah** dengan indikator :

a) Rata-rata peningkatan PAD
b) Rata-rata pertumbuhan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah
c) Persentase dokumen keuangan yang selesai tepat waktu
d) Persentase laporan aset/barang daerah diterbitkan tepat waktu

Untuk arah kebijakan a) sampai dengan arah kebijakan d) pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah** yang bertujuan untuk memantapkan kemandirian keuangan daerah. Indikator dari Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah adalah persentase peningkatan pajak daerah.

Sementara untuk arah kebijakan e) pada tahun 2016 belum ditetapkan dan dengan mempertimbangkan perkembangan dan dinamika lingkungan saat ini, maka pada tahun 2017-2021 arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Peningkatan Kinerja BUMD Pendukung**

Keuangan Daerah yang bertujuan untuk memantapkan kemandirian keuangan daerah.

Indikator dari Program Peningkatan Kinerja BUMD Pendukung Keuangan Daerah adalah persentase BUMD yang berkinerja sesuai standar.

Untuk arah kebijakan f) pada tahun 2016 didukung oleh **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah** dengan indikator:

a) Rata-rata peningkatan PAD
b) Rata-rata pertumbuhan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah
c) Persentase dokumen keuangan yang selesai tepat waktu
d) Persentase laporan aset/barang daerah diterbitkan tepat waktu

Untuk arah kebijakan f) pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Pengelolaan Keuangan Daerah** yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator dari Program Pengelolaan Keuangan Daerah adalah tingkat ketepatan penyelesaian dokumen keuangan.

60. Strategi Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk usaha mikro

Strategi Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk usaha mikro dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

a) Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk usaha mikro
b) Fasilitasi akses permodalan dan skema pembiayaan, termasuk Pengembangan kemitraan perusahaan besar dengan usaha mikro
c) Peningkatan kualitas SDM usaha mikro dalam pengaplikasian teknologi tepat guna
d) Fasilitasi kepemilikan sertifikat mutu produk

Untuk keempat arah kebijakan diatas pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah** dan **Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir**.

Indikator dari Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, antara lain :

a) Persentase peningkatan volume usaha mikro binaan
b) Presentase peningkatan jumlah usaha mikro binaan yang kualitasnya meningkat
c) Akumulasi volume usaha mikro binaan
d) Akumulasi jumlah usaha mikro yang mengisi sentra binaan
e) Persentase peningkatan volume usaha kecil menengah binaan
f) Akumulasi volume usaha kecil menengah binaan

Indikator dari Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, antara lain :

a) Produktivitas hasil olahan perikanan
b) Produktivitas usaha garam

Sedangkan pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program perluasan jangkauan pemasaran**, **Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro** dan **Program Standarisasi Produk Usaha Mikro** bertujuan untuk mendorong pemantapan daya saing UMK pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif.

Untuk arah kebijakan a) pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program perluasan jangkauan pemasaran** dengan indikator, antara lain:

a) Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya
b) Persentase sentra yang beroperasi secara optimal
c) Persentase pembangunan fasilitas ekonomi

Arah kebijakan b) pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro**, dengan indikator persentase usaha mikro yang berhasil mendapatkan bantuan permodalan.

Sedangkan, arah kebijakan c) dan d) pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Standarisasi Produk Usaha Mikro** dengan indikator, antara lain :

a) Persentase Usaha Mikro yang mengaplikasikan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam proses usaha
b) Persentase produk usaha mikro yang layak diuji mutukan

61. Strategi Meningkatkan proporsi jumlah koperasi sehat melalui penataan kelembagaan dan pembinaan usaha

Strategi Meningkatkan proporsi jumlah koperasi sehat melalui penataan kelembagaan dan pembinaan usaha dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

a) Pemantauan kinerja koperasi melalui pendampingan RAT
b) Peningkatan kapasitas SDM pengelola dan pengurus koperasi pada aspek kelembagaan
c) Fasilitasi promosi unit bisnis koperasi
d) Sertifikasi pengelola usaha simpan pinjam

Untuk keempat arah kebijakan diatas pada tahun 2016 didukung oleh **Program Peningkatan Kualitas Koperasi** dengan indikator, antara lain :

a) Tingkat pertumbuhan anggota koperasi
b) Persentase peningkatan jumlah koperasi berkualitas
c) Persentase peningkatan jumlah koperasi tidak aktif yang berhasil direvitalisasi
d) Persentase peningkatan volume usaha koperasi aktif

Sedangkan pada tahun 2017-2021, keempat arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program penguatan kelembagaan koperasi** dan **Program peningkatan kualitas usaha koperasi** yang bertujuan untuk mendorong pemantapan daya saing UMK pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif.

Untuk arah kebijakan a) dan b) pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program penguatan kelembagaan koperasi** dengan indikator persentase koperasi berklasifikasi AAB.

Sedangkan arah kebijakan c) dan d) pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program peningkatan kualitas usaha koperasi**, dengan indikator tingkat pertumbuhan koperasi yang meningkat volume usahanya.

62. Strategi Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk pertanian

Strategi Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk pertanian dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

a) Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk pertanian
b) Penyediaan akses pasar melalui pelaksanaan even-even promosi produk pertanian
c) Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk peternakan

Untuk arah kebijakan a) dan arah kebijakan b), pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pelayanan Pembibitan dan Penyuluhan pertanian/Perkebunan, Perikanan dan Peternakan** serta **Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan**.

Untuk arah kebijakan c), pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pelayanan Pembibitan dan Penyuluhan pertanian/Perkebunan, Perikanan dan Peternakan**, **Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan,** dan **Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak**.

Indikator untuk **Program Pelayanan Pembibitan dan Penyuluhan pertanian/Perkebunan, Perikanan dan Peternakan**, antara lain :

a) Cakupan sebaran penyediaan bibit pada pembudidaya
b) Persentase kemampuan penyuluh dalam melakukan pendampingan terhadap kelompok tani

Indikator untuk **Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan** adalah produktivitas pada bidang pertanian/perkebunan.

Indikator untuk **Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan** adalah produktivitas di bidang peternakan.

Sedagkan, indikator untuk **Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak**, antara lain :

a) Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi
b) Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan pengobatan

Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program pengaplikasian teknologi tepat guna dalam budidaya tanaman pangan dan hortikultura**, **Program pengaplikasian teknologi tepat guna dalam budidaya tanaman pangan dan hortikultura**, **Program peningkatan pemasaran hasil pertanian**, **Program pengaplikasian teknologi tepat guna dalam budidaya peternakan** dan **Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan ternak** yang bertujuan untuk mendorong pemantapan daya saing UMK pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif.

Untuk arah kebijakan a), pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program penyediaan Sarana Prasarana budidaya tanaman pangan dan hortikultura,** dengan indikator persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi, serta **Program pengaplikasian teknologi tepat guna dalam budidaya tanaman pangan dan hortikultura,** dengan indikator persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya.

Untuk arah kebijakan b), pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program peningkatan pemasaran hasil pertanian,** dengan indikator persentase pembudidaya yang omzetnya meningkat.

Sedangkan, arah kebijakan c) pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program pengaplikasian teknologi tepat guna dalam budidaya peternakan,** dengan indikator persentase pembudidaya ternak yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya serta **Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan ternak,**

dengan indikator persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan.

63. Strategi Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk kelautan dan perikanan

Strategi Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui arah kebijakan pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk budidaya perikanan.

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pengembangan Perikanan Tangkap** dengan indikator produktivitas tangkapan ikan (termasuk budidaya ikan di laut), **Program Pengembangan Perikanan Budidaya** dengan indikator produktivitas budidaya perikanan, **Program Pelayanan Pembibitan dan Penyuluhan pertanian/Perkebunan, Perikanan dan Peternakan** dengan indikator, antara lain :

a) Cakupan sebaran penyediaan bibit pada pembudidaya
b) Persentase kemampuan penyuluh dalam melakukan pendampingan terhadap kelompok tani

Serta **Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir**, dengan indikator, antara lain :

a) Produktivitas hasil olahan perikanan
b) Produktivitas usaha garam

Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program penyediaan Sarana Prasarana kelautan dan perikanan** dan **Program pengaplikasian teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan** yang bertujuan untuk Mendorong pemantapan daya saing UMK pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif.

Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program penyediaan Sarana Prasarana kelautan dan perikanan,** dengan indikator persentase pembudidaya yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana perikanan dan kelautan, serta **Program**

pengaplikasian teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan, dengan indikator persentase pembudidaya perikanan dan kelautan yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya.

64. Strategi Mengembangkan pusat-pusat desiminasi teknologi dan informasi dan pendampingan untuk pengembangan ekonomi kreatif

Strategi Mengembangkan pusat-pusat desiminasi teknologi dan informasi dan pendampingan untuk pengembangan ekonomi kreatif pada tahun 2016 belum ditetapkan dan dengan mempertimbangkan perkembangan dan dinamika lingkungan saat ini, maka pada tahun 2017-2021 dilaksanakan melalui strategi pemanfaatan fasilitas publik sebagai pusat desiminasi teknologi, informasi dan pendampingan dalam pengembangan ekonomi kreatif masyarakat kota.

Arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif**, **Program legalisasi usaha kreatif**, dan **Program perkuatan permodalan usaha kreatif** yang bertujuan untuk Mendorong pemantapan daya saing UMK pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif.

Indikator dari **Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif**, antara lain :

a) Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif kuliner
b) Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif desain dan fashion
c) Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif handicraft
d) Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif seni pertunjukkan
e) Persentase rumah kreatif yang beroperasi

Indikator dari **Program legalisasi usaha kreatif** adalah persentase pelaku usaha kreatif yang mendapatkan legalisasi usaha.

Sedangkan, indikator dari **Program perkuatan permodalan usaha kreatif** adalah persentase kebutuhan modal kerja dan modal investasi pelaku usaha kreatif yang dapat dipenuhi.

65. Strategi Meningkatkan daya tarik wisata

Strategi Meningkatkan daya tarik wisata dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain :

a) Peningkatan kualitas Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)
b) Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* bidang pariwisata
c) Meningkatkan *image/branding*/ikon pariwisata Surabaya melalui strategi promosi yang efektif
d) Penyelenggaraan *event* yang mempunyai daya tarik secara periodik

Untuk arah kebijakan a) dan b) tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pengembangan Destinasi Pariwisata** dengan indikator:

a) Rata-rata kunjungan wisatawan mancanegara ke ODTW per bulan
b) Rata-rata kunjungan wisatawan nusantara ke ODTW per bulan

Untuk arah kebijakan c) dan d) tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata** dengan indikator:

a) Rata-rata kunjungan wisatawan nusantara per bulan
b) Rata-rata kunjungan wisatawan mancanegara per bulan

Pada tahun 2017-2021, untuk arah kebijakan a) didukung oleh **Program pengembangan destinasi wisata** yang bertujuan untuk Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global.

Indikator Program pengembangan destinasi wisata adalah persentase ODTW yang berhasil dikembangkan.

Sedangkan, arah kebijakan b) didukung oleh **Program pengembangan kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata** yang bertujuan untuk Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global.

Indikator Program pengembangan kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata adalah tingkat capaian kesepakatan dengan *stakeholder* bidang pariwisata yang dilaksanakan 5 kesepakatan.

Sedangkan, arah kebijakan c) dan d) didukung oleh **Program pemasaran pariwisata** yang bertujuan untuk Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global.

Indikator Program pemasaran pariwisata adalah persentase kunjungan di objek wisata terhadap kunjungan wisatawan.

66. Strategi Meningkatkan iklim investasi dan usaha dengan memberikan kepastian usaha dan mengembangkan daya tarik investasi

Strategi Meningkatkan iklim investasi dan usaha dengan memberikan kepastian usaha dan mengembangkan daya tarik investasi dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain :

a) Pemberian kepastian usaha melalui regulasi penanaman modal dan usaha
b) Pengembangan strategi promosi investasi

Untuk arah kebijakan a) dan b) tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi** dengan indikator persentase meningkatnya jumlah realisasi ijin penunjang investasi.

Pada tahun 2017-2021, untuk arah kebijakan a) dan b) didukung oleh **Program peningkatan iklim dan realisasi investasi** yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja investasi dalam rangka mewujudkan daya saing global.

Indikator Program peningkatan iklim dan realisasi investasi, antara lain :

a) Tingkat pertumbuhan ijin realisasi investasi
b) Tingkat pertumbuhan jumlah minat dan rencana investasi

67. Strategi Meningkatkan kapasitas sistem drainase kota untuk mengurangi dampak genangan air saat musim hujan dan laut pasang

Strategi menyediakan sarana prasarana pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

a) Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase secara rutin dan berkelanjutan
b) Pemantauan rutin ketinggian air terutama saat musim hujan dan laut pasang

Untuk kedua arah kebijakan diatas pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pengendalian Banjir** dengan indikator Tingkat genangan.

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase kota** yang bertujuan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan kinerja sistem drainase kota.

Indikator dari Program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase kota, antara lain:

a) Luas genangan (ha)
b) Tinggi genangan (cm)
c) Lama genangan (menit)
d) Persentase pembangunan jaringan drainase yang selesai tepat waktu

68. Strategi Mengembangkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan yang terkoneksi dengan jaringan jalan regional dan nasional

Strategi Mengembangkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan yang terkoneksi dengan jaringan jalan regional dan nasional, dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain :

a) Penambahan dan peningkatan jaringan jalan
b) Pemantapan kondisi jaringan jalan

Untuk kedua arah kebijakan diatas pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan** dengan indikator, antara lain :

a) Persentase Penyediaan Prasarana Pejalan Kaki
b) Penambahan jalan baru
c) Persentase jalan dalam kondisi baik

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan** yang bertujuan untuk meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu.

Indikator dari Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan, antara lain:

a) Persentase jalan yang terbangun (%)
b) Persentase penyediaan prasarana pejalan kaki (%)
c) Persentase jalan yang mendapatkan perbaikan (%)
d) Persentase Pembangunan Jaringan Jalan dan Jembatan yang selesai tepat waktu

69. Strategi Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas

Strategi Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

a) Menginformasikan standar keselamatan lalu lintas secara massal
b) Penyediaan prasarana fasilitas perlengkapan jalan yang memadai
c) Penerapan *traffic demand management*

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pengembangan Sistem Transportasi** dengan indikator, antara lain :

a) Rata-rata *Headway* Angkutan Umum
b) Kecepatan perjalanan rata-rata kendaraan di Jalan Arteri Primer
c) Kecepatan perjalanan rata-rata kendaraan di Jalan Arteri Sekunder
d) Penggunaan kendaraan umum (*Load Factor*)

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi** yang bertujuan untuk meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu.

Indikator dari Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi, yaitu :

a) Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota
b) Persentase selisih tingkat kecelakaan lalu lintas

70. Strategi Meningkatkan Jumlah Pengguna Angkutan Umum Massal dan Berkurangnya Penggunaan Kendaraan Pribadi

Strategi Meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum massal dan berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

a) Peningkatan sistem manajemen angkutan umum massal yang aman, nyaman dan ramah
b) Pembangunan dan pengembangan prasarana perpindahan moda transportasi kota yang aman, nyaman dan terintegrasi dengan pelayanan regional dan nasional
c) Pelaksanaan pengujian kelayakan kendaraan angkutan (KIR) sesuai ketentuan

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pengembangan Sistem Transportasi,** dengan indikator:

a) Rata-rata *Headway* Angkutan Umum
b) Kecepatan perjalanan rata-rata kendaraan di Jalan Arteri Primer
c) Kecepatan perjalanan rata-rata kendaraan di Jalan Arteri Sekunder
d) Penggunaan kendaraan umum (*Load Factor*)

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan** yang bertujuan untuk meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu.

Indikator dari Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan, antara lain:

a) Rata-rata *headway* angkutan umum (Angkot/feeder)
b) Rata-rata *headway* angkutan umum (Bus Kota)
c) Persentase penyediaan sarana prasarana pendukung transportasi berkelanjutan

71. Strategi Menyediakan air bersih yang mudah diakses masyarakat

Strategi Menyediakan air bersih yang mudah diakses masyarakat dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

a) Penyediaan sarana jaringan air bersih
b) Koordinasi pengembangan sistem distribusi air bersih dengan BUMD

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan** dengan indikator Penambahan jaringan infrastruktur air bersih.

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan** yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata.

Indikator dari Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan adalah Persentase pelanggan baru PDAM (%).

72. Strategi Meningkatkan kuantitas, efektivitas dan efisiensi penggunaan PJU yang terpasang

Strategi Meningkatkan kuantitas, efektivitas dan efisiensi penggunaan PJU yang terpasang dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

a) Penerapan sistem manajemen dalam pemantauan dan pemeliharaan PJU secara berkala
b) Penyediaan utilitas PJU
c) Penggunaan PJU hemat energi

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Utilitas Perkotaan** dengan indikator:

a) Lama perbaikan PJU padam < 6 jam
b) Panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan
c) Persentase penggunaan LED untuk PJU

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU** yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata.

Indikator dari Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU, antara lain:

a) Panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan
b) Persentase pemasangan PJU hemat energi

73. Strategi Menyediakan sarana utilitas kota secara terpadu untuk mendukung kebutuhan perkembangan kota

Strategi Menyediakan sarana utilitas kota secara terpadu untuk mendukung kebutuhan perkembangan kota dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

a) Koordinasi penataan utilitas dan sarana prasarananya
b) Pengawasan instalasi dan penataan utilitas serta sarana prasarananya

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Utilitas Perkotaan** dengan indikator, antara lain :

a) Lama perbaikan PJU padam < 6 jam
b) Panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan
c) Persentase penggunaan LED untuk PJU

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota** yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata.

Indikator dari Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota adalah Persentase rekomendasi utilitas yang dikeluarkan dibanding permohonan utilitas yang memenuhi syarat.

Tabel VII.1
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Surabaya

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
1	Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal	Menyediakan sarana prasarana pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan	Penyediaan perlengkapan dan penunjang operasional sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) : - PAUD - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK	Angka Partisipasi Kasar (APK) : - PAUD = 99,02% - SD/MI = 105,24% - SMP/MTs = 105,03% - SMA/MA/SMK = 105,08%	Angka Partisipasi Kasar (APK) : - PAUD = 70,50% - SD/MI = 100,00% - SMP/MTs = 91,99% - SMA/MA/SMK = 90,73%	1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3. Program Pendidikan Menengah	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Pendidikan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
			Penerimaan dan penilaian peserta didik berbasis teknologi informasi	Angka Partisipasi Murni (APM) : - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK	Angka Partisipasi Murni (APM) : - SD/MI = 95,02% - SMP/MTs = 95,03% - SMA/MA/SMK = 92,55%	Angka Partisipasi Murni (APM) : - SD/MI = 96,59% - SMP/MTs = 84,50% - SMA/MA/SMK = 84,79%				
			Pembangunan lokal/ruang kelas	Angka Putus Sekolah (APS) : - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA - SMK	Angka Putus Sekolah (APS) : - SD/MI = 0% - SMP/MTs = 0% - SMA/MA = 0,004% - SMK = 0,007%	Angka Putus Sekolah (APS) : - SD/MI = 0,73% - SMP/MTs = 0,73% - SMA/MA = 0,75% - SMK = 0,74%				
			Penyediaan biaya operasional pendidikan	Angka Kelulusan (AL): - SD/MI - SMP/MTs	Angka Kelulusan (AL): - SD/MI = 100% - SMP/MTs =	Angka Kelulusan (AL): - SD/MI =				

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
				- SMA/MA - SMK	100% - SMA/MA = 99,97% - SMK = 99,97%	100% - SMP/MTs = 99,25% - SMA/MA = 98,50% - SMK = 98,50%				
			Penyediaan bantuan personal siswa dari keluarga miskin	Angka Melanjutkan (AM): - SD/MI ke jenjang SMP/MTs - SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK	Angka Melanjutkan (AM): - SD/MI ke jenjang SMP/MTs = 99,54% - SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK = 100,04%	Angka Melanjutkan (AM): - SD/MI ke jenjang SMP/MTs = 99,50% - SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK = 98,50%				
		Meningkatkan kualitas pendidikan formal	Pemantauan pelaksanaan kurikulum secara berkesinambungan	Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK yang terakreditasi	21,45%	32,86%	1.Program Pendidikan Anak Usia Dini 2.Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3. Program Pendidikan Menengah	Program Penerapan Kurikulum	Pendidikan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
			Pembinaan peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dengan penekanan pada penguatan akhlak							
			Persiapan dan pelaksanaan ujian sekolah							
			Penyiapan lulusan							

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
			pendidikan menengah sebagai tenaga kerja yang memiliki keahlian dan daya saing							
			Pembinaan dan pendampingan peningkatan prestasi pendidikan				*hanya sesuai dengan strategi nomor 1* 1. Program Peningkatan Prestasi Non Akademik *sesuai dengan strategi 1 dan 2* 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3. Program Pendidikan Menengah	Program Peningkatan Prestasi	Pendidikan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
		Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pemberian biaya jasa pelayanan Pendidik				Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
			Peningkatan jenjang pendidikan akademik dan pengembangan kompetensi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan							

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
			Sertifikasi bagi Pendidik							
		Meningkatkan manajemen pengelolaan pendidikan formal	Penerapan manajemen pengelolaan berbasis perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pada sekolah				1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3. Program Pendidikan Menengah	Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
			Pembinaan dan pendampingan peningkatan akreditasi sekolah							
2	Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan nonformal	Meningkatkan kualitas pendidikan nonformal	Penjaringan siswa kejar paket	Persentase lembaga pendidikan non formal yang terakreditasi	8,11%	39,33%	Program Pendidikan Non Formal	Program Pendidikan Kesetaraan	Pendidikan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
			Pemberian bantuan biaya operasional pendidikan siswa kejar paket							
			Pembinaan dan pendampingan peningkatan akreditasi Lembaga Kursus dan Pelatihan				Program Pendidikan Non Formal	Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan	Pendidikan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
			Fasilitasi dan monitoring pelaksanaan TPA/TPQ dan Kelas Minggu							
3	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin	Pembayaran iuran jaminan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan kelompok	Persentase penduduk miskin yang terlayani di layanan kesehatan	100%	100%	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk	Kesehatan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
	bagi warga miskin		tertentu	Indeks kepuasan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin	N/A	70		Miskin		Kesehatan
4	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu dan anak	Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak	Pelaksanaan deteksi dini kelainan kehamilan	Cakupan pelayanan ibu nifas	93,80%	95%	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Kesehatan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
				Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH (kelahiran hidup)	≤ 87,35 per 100.000 KH	≤ 75,93 per 100.000 KH				
			Pemberian imunisasi bayi dan balita	Cakupan pelayanan kesehatan bayi	93,69%	96%				
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH (kelahiran hidup)	≤ 6,48 per 1.000 KH	≤ 6,26 per 1.000 KH				
		Meningkatkan cakupan pelayanan gizi ibu dan anak	Pemberian makanan tambahan bagi balita kurang gizi dan makanan pendamping ASI	Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100%	100%	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak	Kesehatan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
			Pendampingan dan pemantauan status gizi ibu hamil/menyusui, bayi dan balita							
			Pemberian makanan tambahan dan suplemen bagi							

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
			ibu hamil							
			Pendampingan ibu dan anak pada 1000 hari pertama kelahiran							
			Pengembangan kampung ASI							
5	Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan	Mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana RSUD dan Puskesmas sesuai standar sarana dan prasarana, tipe rumah sakit, dan perkembangan ilmu kesehatan	Perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana berdasarkan standar dan perkembangan ilmu kesehatan	Persentase puskesmas yang terakreditasi	4,76%	100%	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu	Kesehatan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
			Peningkatan sarana prasarana kesehatan melalui sistem informasi kesehatan							
			Pemenuhan operasional pelayanan kesehatan							
			Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara berkala dan bersifat preventif	Persentase rumah sakit yang terakreditasi	50%	100%	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Kesehatan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
			Perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana sesuai tipe rumah sakit dan	Indeks Kepuasan Layanan RSUD Bhakti Dharma Husada	N/A	81				

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
			perkembangan ilmu kesehatan							
		Meningkatkan kinerja pelayanan RSUD dan Puskesmas/Puskesmas Pembantu (Pustu) sesuai standar untuk keselamatan pasien	Pelaksanaan akreditasi puskesmas & rumah sakit dan pemantauan implementasinya secara berkala				Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
			Peningkatan mutu SDM kesehatan melalui sertifikasi dan akreditasi	Indeks Kepuasan Layanan RSUD dr. M Soewandie	N/A	75				
			Pengembangan manajemen serta pelayanan kesehatan rujukan, medik, administrasi, dan keperawatan di sarana kesehatan							
		Menjamin ketersediaan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan di sarana kesehatan sesuai kebutuhan	Perencanaan dan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan berbasis kebutuhan				Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit	Kesehatan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
							Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu	Kesehatan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
6	Mewujudkan lingkungan	Mendorong pola hidup bersih dan	Pemantauan kebersihan dan	Persentase kelurahan	100%	100%	Program Upaya Kesehatan	Program Upaya Kesehatan	Kesehatan	Perangkat Daerah yang

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
	sehat di masyarakat	sehat di masyarakat melalui upaya promotif dan preventif	kesehatan makanan dan minuman di masyarakat	siaga aktif			Masyarakat	Masyarakat		melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
			Promosi hidup sehat di masyarakat, rumah sakit dan Puskesmas	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <20 jam	N/A	100%				
			Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular							
			Penyediaan pelayanan kesehatan khusus							
7	Meningkatnya kualitas layanan KB dasar	Meningkatkan cakupan peserta KB Aktif	Penyediaan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin di setiap fasilitas kesehatan milik Pemerintah	*Total Fertility Rate* (TFR)	1,81	1,80 - 1,90	Program Keluarga Berencana	Program Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Peningkatan partisipasi peserta KB pria							
			Peningkatan kesadaran masyarakat peduli keluarga berencana							
			Pembinaan kader Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia				Program Bina Keluarga	Program Bina Keluarga	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
			(BKL)							Penduduk dan Keluarga Berencana
8	Meningkatkan ketersediaan, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pola pangan harapan dan keamanan pangan	Meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman	Tingkat kualitas konsumsi dan keamanan pangan	88,50%	92,00%	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman dan Keamanan Pangan	Pangan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
9	Meningkatkan distribusi pangan	Mengendalikan kestabilan harga dan pasokan	Pemantauan perkembangan harga dan pasokan serta mengkoordinasikan operasi pasar	Tingkat stabilitas harga komoditas pangan	91,30%	95,00%	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan	Perdagangan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
10	Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan	Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas	Menggiatkan organisasi kepemudaan di tingkat RW/Kelurahan (Karang Taruna) dengan konsep kekinian Pendampingan pemuda menjadi agen perubahan bagi generasi muda di tingkat kota (pemuda pelopor)	Angka pemuda kader anti kenakalan remaja per 10.000 pemuda	4,58	36,65	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Kepemudaan dan Olahraga	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
11	Meningkatkan dan	Meningkatkan prestasi pemuda	Pelaksanaan event kejuaraan	Persentase atlit yang	59%	65%	Program Pembinaan dan	Program Pembinaan dan	Kepemudaan dan Olahraga	Perangkat Daerah yang

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
	mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional	di bidang olahraga	olahraga skala kota secara rutin Pemberian kesejahteraan bagi atlit Peningkatan pembangunan dan pemeliha-raan prasarana olahraga	memiliki prestasi di tingkat Regional, Nasional dan Internasional			Pemasyarakatan Olah Raga	Pemasyarakatan Olah Raga		melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
12	Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja	Memperluas kesempatan kerja formal	Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi Pengembangan sistem informasi dan promosi ketenagakerjaan yang terintegerasi dan efektif Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja, konseling dan *job matching* yang tepat Fasilitasi kerjasama lembaga pendidikan, pelatihan dan pemberi kerja	Persentase pencari kerja terserap pada pasar kerja formal	68%	> 40%	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tenaga Kerja	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
		Menumbuhkan wirausaha muda baru yang produktif	Pelaksanaan pelatihan wirausaha bagi pemuda	Persentase wirausaha muda yang berdaya	5%	7,50%	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tenaga Kerja	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
										Bidang Kepemudaan dan Olahraga
		Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Sertifikasi tenaga kerja dan lulusan pelatihan				Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Tenaga Kerja	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
			Fasilitasi akreditasi lembaga pelatihan							
			Pemasyarakatan budaya produktif dan etos kerja							
13	Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis	Menerapkan prinsip-prinsip hubungan industrial dalam pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Mendorong perusahaan memiliki Peraturan Kerja dan mengawasi penerapannya	Persentase jumlah kasus ketenagakerjaan	2,90%	2,10%	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Tenaga Kerja	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
			Mendorong terwujudnya penetapan upah dan skala upah yang adil							
		Meningkatkan penerapan norma kerja (termasuk norma kerja perempuan dan anak) dan K3	Peningkatan pemahaman norma kerja dan K3 serta pengawasan atas penerapannya				Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan	Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
			Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan							
14	Meningkatkan pelayanan pemenuhan	Meningkatkan jangkauan layanan	Peningkatan kualitas pelayanan dan	Persentase PMKS yang ditangani yang	12,44%	16%	Program Pelayanan dan Rehabilitasi	Program Pelayanan dan Rehabilitasi	Sosial	Perangkat Daerah yang melaksanakan

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
	kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS	rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen untuk penanganan PMKS	sarana prasarana UPTD rehabilitasi kesejahteraan sosial	berhasil direhabilitasi			Kesejahteraan Sosial	Kesejahteraan Sosial		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
			Pemberian kebutuhan dasar permakanan bagi korban bencana, lansia, anak yatim, piatu, yatim piatu dan penyandang cacat miskin dan terlantar							
			Penjangkauan dan pemulangan PMKS ke daerah asal							
			Pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin							
			Pemberdayaan dan pembinaan relawan sosial dan organisasi sosial				Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Sosial	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
15	Meningkatkan keterampilan PMKS usia produktif	Membentuk kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat dan memantau serta mengembangkan nya secara berkelanjutan	Pembentukan kelompok yang mewadahi PMKS usia produktif	Persentase PMKS usia produktif yang omzetnya ≥ 1 juta rupiah per bulan	43,23%	80%	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
			Fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan ekonomi PMKS usia produktif							

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
			hingga mampu berproduksi dan dapat dilimpahkan penanganannya ke Dinas Koperasi dan UMKM							Berencana
			Pengembangan hasil usaha kelompok							
			Mengoptimalkan fungsi kader pemberdayaan masyarakat							
			Peningkatan pembinaan dan pelatihan ketrampilan bagi PMKS							
16	Meningkatkan pemberdayaan perempuan	Meningkatkan akses, kontrol, partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Penguatan kelembagaan dan jaringan PUG dan PUHA	Persentase kecamatan yang responsif gender	19,35%	100%	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Penyediaan data terpilah terkait potensi pengarusutamaan gender sebagai bahan pengambilan kebijakan yang responsif gender							
17	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak	Melindungi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan *trafficking* melalui	Fasilitasi layanan mencakup mekanisme pelaporan, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial	Persentase Kelurahan Ramah Anak	3,25%	100%	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
		pendampingan terhadap korban sekaligus mengembangkan upaya pencegahan tindak kekerasan dan *trafficking*	terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan *trafficking* (pelaku, korban, saksi)				Anak			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Pemberian bantuan hukum bagi anak yang terlibat tindak kekerasan							
			Pemberdayaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTP2A) dalam kerjasama dengan lembaga, masyarakat dan dunia usaha							
18	Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah	Meningkatkan ketertiban umum dengan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah	Penyiapan tenaga penertiban	Angka Pelanggaran Perda per 1.000 penduduk	18,71	16,57	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Program Penegakan Peraturan Daerah	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
			Peningkatan kapasitas personil penertiban dengan pembinaan pasca pendidikan							
			Peningkatan intensitas pengawasan dalam menertibkan kota							
			Penindakan dan evaluasi							

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
			pelanggaran Perda							
19	Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma masyarakat, toleransi dan kerukunan antar umat beragama	Meningkatkan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan serta mewujudkan kerukunan hidup bermasyarakat	Pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat	Angka Kejadian Anarkis per 100.000 penduduk	1,09	0,88	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
			Peningkatan kerjasama dan pengendalian di bidang keamanan							
			Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan terhadap kader wasbang							
			Peningkatan intensitas kegiatan yang mendukung perilaku toleransi dan kerukunan beragama							
			Pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan							
			Pemantauan orang asing, organisasi kemasyarakatan asing dan tenaga kerja asing							
20	Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi	Menyelesaikan penyusunan seluruh rencana	Penyusunan dan pemutakhiran rencana induk	Persentase rencana Induk sektoral dan	0%	41,38%	Program Penataan Ruang	Program Perencanaan Ruang Kota	Pekerjaan Umum dan Penataan	Perangkat Daerah yang melaksanakan

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
	rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)	induk sektoral	sektoral berbasis teknologi informasi	rencana rinci yang disusun dan telah tersinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah					Ruang	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk koordinasi dalam perencanaan sektoral							
		Menyelesaikan penyusunan seluruh rencana rinci tata ruang kota yang terintegrasi baik dalam skala lokal maupun regional	Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk koordinasi dalam perencanaan rinci tata ruang kota							
			Penetapan seluruh rencana rinci tata ruang kota secara bertahap							
			Peningkatan upaya integrasi sistem perencanaan tata ruang berbasis TIK							
		Optimalisasi penataan ruang melalui pengendalian pemanfaatan ruang	Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk koordinasi				Program Penataan Ruang	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
			dalam pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota							Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Pemanfaatan aplikasi berbasis TIK yang terintegrasi untuk pelayanan perizinan							
			Penerapan sistem *reward* dan *punishment* dalam membangun kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi perizinan bangunan							
21	Mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Peningkatan upaya percepatan pengadaan lahan melalui koordinasi lintas sektor dan pendekatan persuasif kepada masyarakat	Persentase lokasi lahan yang tersedia bagi pembangunan untuk kepentingan umum	52,17%	100%	Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Pertanahan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
22	Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan	Mengoptimalkan sistem manajemen pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Kota	Peningkatan upaya pengamanan aset melalui pengamanan administrasi, fisik, pemanfaatan dan	Persentase aset tanah dan/atau bangunan yang terintegrasi dalam sistem pengamanan	N/A	75,22%	Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota	Program Pengamanan Aset	Pertanahan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
		Surabaya	hukum	dan pengelolaan aset						
			Pemantauan dan pemutakhiran data aset tanah dan/atau bangunan secara berkala melalui *database* yang terintegrasi				Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota	Program Pengelolaan Aset	Pertanahan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
23	Meningkatkan manajemen pengelolaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Mengoptimalkan pengelolaan RTH yang sudah dikuasai Pemerintah Kota Surabaya	Optimalisasi UPTD dan/atau rayon yang secara khusus menangani pengelolaan RTH	Persentase selisih luasan RTH yang dibangun dan dipelihara	0% (321,40 Ha)	11,20%	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau	Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
			Penyediaan kecukupan anggaran pembangunan, operasional dan pemeliharaan dalam rangka peningkatan penyediaan RTH							
24	Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan	Mengoptimalkan fungsi fasilitas pengelolaan sampah	Peningkatan pemanfataan fasilitas pengelolaan sampah berteknologi tepat guna dan ramah lingkungan	Persentase selisih timbulan sampah ke TPA	N/A	21,90%	Program Pengelolaan Kebersihan Kota	Program Pengelolaan Kebersihan	Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
		Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	Peningkatan peran serta sekolah dan kantor swasta dalam pengendalian							

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
			sampah							
			Peningkatan pengelolaan sampah berbasis 3R di tingkat RT/RW dan Kelurahan secara berkala							
25	Meningkatkan kualitas udara dan air	Pengendalian pencemaran air dan udara skala kota	Pemantauan dan penegakan aturan tentang pengendalian pencemaran air dan udara terutama pada sektor industri dan komersial	Indeks Kualitas Udara Ambien	83,85	85,25	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan	Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
			Optimalisasi pemanfaatan stasiun monitoring udara ambient							
			Pemantauan pengendalian pencemaran limbah domestik di perumahan dan kawasan permukiman	Indeks Kualitas Air Permukaan	51,46	53,48				
			Peningkatan kualitas air permukaan untuk mendukung ketersediaan air baku							
26	Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang	Memantau secara berkesinambungan dan memutakhirkan	Peningkatan kecakapan masyarakat dan petugas dalam	Indeks penanggulangan bencana	N/A	84,69%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Program Penanggulangan Bencana	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
	antisipatif dan tanggap	sistem mitigasi dan penanggulangan bencana skala kota	penanggulangan bencana						Masyarakat	Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
			Peningkatan sistem manajemen resiko dan mitigasi bencana non alam melalui upaya optimalisasi rekomendasi dan pemantauan berkala proteksi kebakaran pada bangunan dan kawasan permukiman							
			Penyediaan sarana/akses untuk kemudahan penanggulangan bencana							
			Peningkatan sistem mitigasi dalam upaya mendukung pengelolaan tanggap darurat bencana							
			Peningkatan upaya integrasi antar *stakeholder* dalam pengelolaan tanggap darurat bencana							
27	Meningkatkan penyediaan	Menyediakan rumah layak huni	Pembangunan rumah susun	Kawasan permukiman	3039,33 Ha	11437,03 Ha	Program Perumahan dan	Program perumahan dan	Perumahan dan Kawasan	Perangkat Daerah yang

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
	serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni	dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman	bagi masyarakat berpenghasilan rendah	yang telah ditingkatkan kualitas lingkungannya			Permukiman	kawasan permukiman	Permukiman	melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan sistem setempat							
			Peningkatan sarana prasarana perumahan dan kawasan permukiman							
28	Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	Peningkatan upaya penerapan upaya pengembangan energi alternatif di gedung milik pemerintah	Persentase upaya penerapan teknologi untuk pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	N/A	100%	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif	Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
		Memasyarakatkan penggunaan energi alternatif kepada seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha	Optimalisasi penggunaan sumber energi alternatif terbarukan yang telah diterapkan pemerintah kota	Persentase peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	N/A	100%				
			Meningkatkan bentuk kerjasama dengan berbagai institusi serta pendampingan kepada masyarakat untuk							

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
			pengembangan penerapan energi alternatif							
			Pengembangan sistem kompensasi (insentif) bagi pelaku usaha yang memanfaatkan sumber energi alternatif							
29	Meningkatkan upaya penerapan konservasi energi	Menumbuhkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk hemat energi	Pengembangan kerjasama dengan instansi terkait untuk peralihan penggunaan sumber energi di masyarakat	Persentase selisih kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi	N/A	44.25 %	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Program Upaya Konservasi Energi	Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
			Pelaksanaan audit energi dan pendampingan penerapan konservasi energi							
30	Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Menggali potensi dan menetapkan budaya lokal	Menggali potensi budaya lokal	Persentase budaya yang dapat dilestarikan	88,72%	91,59%	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Program perlindungan budaya lokal	Kebudayaan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
			Menetapkan budaya lokal serta bangunan bersejarah sebagai ikon Kota Surabaya							
			Peningkatan kompetensi SDM di bidang budaya melalui forum pelaku budaya							

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
			lokal							
		Mengembangkan budaya lokal dengan cara mengenalkan dan menampilkan budaya lokal kepada masyarakat sehingga bisa dimanfaatkan sebagai tujuan pariwisata	Meningkatkan kualitas penampilan kelompok-kelompok budaya lokal				1. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Program pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Kebudayaan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
			Mendorong sektor-sektor usaha penunjang pariwisata (hotel dan restoran) untuk menampilkan kelompok-kelompok budaya lokal							
31	Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca	Meningkatkan akses baca melalui penambahan layanan baca dan koleksi buku serta peningkatan kualitas layanan baca	Penambahan koleksi buku di layanan baca	Persentase koleksi buku yang termanfaatkan	71,70%	80,70%	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
			Menambah jumlah dan meningkatkan kualitas layanan baca	Persentase pengunjung layanan baca yang meminjam buku	62,10%	83,20%				
			Meningkatkan pembinaan terhadap petugas pengelola layanan baca							
			Mengintegrasi sistem informasi perpustakaan							
		Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat	Meningkatkan *event* pustaka untuk meningkatkan minat baca	Persentase siswa yang mempunyai kemampuan membaca	N/A	100%				

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
			masyarakat	sesuai dengan *reading text leveling*						
			Mengevaluasi kemampuan literasi siswa							
32	Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan	Meningkatkan jumlah warga masyarakat yang memiliki wawasan dan karakter kebangsaan	Bekerjasama dengan institusi pendidikan membangun nilai-nilai dan karakter kebangsaan bagi pelajar melalui kegiatan akademis maupun ekstrakurikuler	Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan	4% (107 lembaga/komunitas)	4%	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Program Pengembangan Wawasan Dan Karakter Kebangsaan Dalam Konteks Budaya Lokal	1. Kebudayaan 2. Pendidikan	1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 2. . Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
			Mengkomunikasikan dan menumbuhkan nilai-nilai dan karakter kebangsaan kepada warga masyarakat melalui sosialisasi dan pengadaan *event* peningkatan nilai kebangsaan							
33	Peningkatan sistem manajemen city logistik	Membangun dan mengembangkan simpul pusat kegiatan logistik kota baik dalam skala pelayanan lokal, regional dan nasional	Meningkatkan akses/sarana dan prasana pendukung menuju simpul kegiatan logistik dan distribusi dalam kota	Tingkat pertumbuhan ekonomi kategori transportasi dan pergudangan	5,59%	5%		Program Pengembangan Hub dan Simpul Logistik untuk Mendukung Distribusi Komoditas Potensial	Perdagangan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
			Pengembangan sistem informasi					Program Manajemen	Perhubungan	Perangkat Daerah yang

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
			dan manajemen rantai pasok (*supply chain management*) yang diperlukan untuk mengintegrasikan komponen-komponen dan kegiatan-kegiatan dalam sistem logistik					Lalu Lintas Angkutan Barang		melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
								Program Peningkatan Investasi Fasilitas Pendukung Logistik	Penanaman Modal	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
34	Meningkatnya jaringan bisnis (G to G dan G to B) jasa dan perdagangan komoditi barang dalam skala internasional dan antar pulau yang ditunjang dengan pusat pelayanan informasi yang terintegrasi	Meningkatkan realisasi kerjasama bidang perdagangan atas MoU yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Surabaya dengan pihak yang bekerjasama	Penyepakatan bidang yang dikerjasamakan dan bentuk lembaga kerjasama beserta deskripsi tugas	Persentase realisasi tindak lanjut MoU bidang Perdagangan (G to G dan G to B)	N/A	85,71%		Program Kerjasama Bidang Perdagangan	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
			Pelaksanaan pemasaran dan promosi obyek kerjasama secara bersama-sama							
			Harmonisasi regulasi bersama yang mengatur implementasi program kerjasama di bidang perdagangan							
			Koordinasi dan dukungan dari Pemerintah Pusat dalam hal:							

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
			instrumen peraturan ekspor-impor; pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktek perdagangan illegal dan proteksi untuk produk dalam negeri							
			Pemusatan kegiatan ekonomi di wilayah tertentu untuk menghasilkan keuntungan bersama, memperpendek mata rantai perdagangan, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penciptaan efisiensi perdagangan							
35	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan	Meningkatkan kedisiplinan aparatur	Pengendalian kedisiplinan aparatur dengan sistem berbasis teknologi	Angka Pelanggaran Disiplin Aparatur per 1.000 pegawai	1,48	1,15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Pengawasan	Inspektorat
		Meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Pengendalian pengelolaan keuangan secara administratif	Persentase pelanggaran tata kelola administrasi keuangan	197 temuan	16,8%				

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
				pada kasus yang sama yang berhasil diturunkan						
		Menempatkan aparatur sesuai kapasitas dan kompetensi, serta melakukan evaluasi atas kompetensi secara berkelanjutan	Pemanfaatan *assessment center* sebagai sarana pengelolaan kompetensi aparatur	Persentase aparatur (struktural & non struktural) yang kompeten	48,64%	93,28%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
36	Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik	Meningkatkan efektivitas dan kinerja lembaga pemerintahan melalui peningkatan penatalaksanaan, tata kelola administrasi dan kearsipan, kerjasama, penyediaan sarana dan prasarana, perencanaan dan pengendalian pembangunan, serta regulasi untuk mendukung pelayanan publik yang baik	Melakukan tinjauan terhadap kesesuaian lembaga beserta tugas pokok dan fungsinya	Persentase Prosedur Operasi Standar (POS) yang diimplementasikan dengan baik	N/A	50%	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah
			Mengoptimalkan penyelenggaraan ketatalaksanaan							
			Memanfaatkan teknologi untuk penataan, penyelamatan dan pelestarian arsip	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan	N/A	80%	1.Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 2. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Program Penataan, Penyelamatan, dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Kearsipan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
			Meningkatkan peran Kecamatan dan Kelurahan untuk menyediakan	Persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi	99,03%	100%	Program Penataan Daerah Otonom	Program Penataan Daerah Otonom	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
			data pemerintahan secara tertib administrasi							
			Melakukan kajian dan analisis untuk rekomendasi kebijakan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan	Persentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi	100%	100%	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah
			Meningkatkan respon dan adaptasi dalam fasilitasi kegiatan DPRD				Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Program Peningkatan kapasitas lembaga fasilitator perwakilan rakyat daerah	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD
			Membuat mekanisme analisa kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi				1. Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Sarana dan Prasarana Perkantoran	Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Sarana dan Prasarana Perkantoran
			Meningkatkan respon dan adaptasi dalam fasilitasi kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah				Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
			Membuat mekanisme analisa kebutuhan dan ketersediaan administrasi perkantoran	Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	N/A	70%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sarana dan Prasarana Perkantoran	Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Sarana dan Prasarana Perkantoran
			Meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD	Persentase kerjasama non perdagangan yang ditindaklanjuti	100%	100%	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah
			Meningkatkan pemahaman SKPD terhadap produk perencanaan pembangunan yang partisipatif	Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program	88,33%	93,05%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan
			Pemanfaatan teknologi untuk mengendalikan pelaksanaan pembangunan	Persentase kegiatan yang serapan anggarannya lebih dari 76%	86,18%	100%	1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan	Sekretariat Daerah
			Melakukan harmonisasi dan	Persentase produk hukum	100%	100%	Program Penataan	Program Penataan	Kebijakan dan Koordinasi	Sekretariat Daerah

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
			simplifikasi produk hukum secara rutin	daerah yang dihasilkan			Peraturan Perundang-Undangan	Peraturan Perundang-Undangan	Perangkat Daerah	
			Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan daerah untuk mendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan					Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik	Statistik	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
37	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas data dan informasi kependudukan skala kota sebagai basis pelayanan dasar kepada masyarakat dan sebagai rekomendasi/bahan evaluasi implementasi kebijakan	Pengembangan *database* kependudukan secara terpadu serta pemutakhiran data secara berkesinambungan yang melibatkan seluruh instansi terkait di Pemerintah Kota	Nilai Kepuasan Masyarakat unit pelayanan administrasi kependudukan & pencatatan sipil	68,91	74	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Penyederhanaan proses perizinan dan non perizinan melalui pelayanan terpadu	Nilai Kepuasan Masyarakat unit pelayanan perizinan dan non perizinan	72,89%	76%	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Penanaman Modal	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
			Penyediaan infrastruktur pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis teknologi							

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
			informasi (*Surabaya Single Window*)							
		Memberikan perlindungan kepada konsumen serta menjamin keamanan perdagangan	Pengawasan barang beredar terutama terhadap barang-barang strategis, obat dan makanan				Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Perdagangan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
			Pemberian edukasi kepada konsumen melalui koordinasi dengan lembaga perlindungan konsumen							
			Meningkatkan jumlah dan kompetensi aparatur metrologi legal							
			Penambahan cakupan Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang diawasi							
			Pengelolaan laboratorium metrologi legal							
		Menyediakan layanan publik berbasis teknologi informasi	Pengembangan *masterplan* pembangunan aplikasi pelayanan publik administratif	Tingkat kepuasan terhadap penyelenggaraan TIK dalam pelayanan	N/A	Baik	Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan	Komunikasi dan Informatika	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
			Pengendalian keamanan data dan informasi layanan (aplikasi, data, jaringan, perangkat keras)	publik administratif				Komunikasi		Komunikasi dan Informatika
		Menyediakan saluran komunikasi dan informasi yang memadai bagi masyarakat dan pihak berkepentingan berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pembangunan skala kota	Mengembangkan komunikasi dan dialog langsung antara masyarakat dengan pimpinan pemerintah kota terkait program-program pembangunan	Tingkat persepsi masyarakat atas pelaksanaan pembangunan kota	N/A	80%	1. Program Komunikasi dan Publikasi Masyarakat 2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat	1. Komunikasi dan Informatika 2. Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
			Menyediakan sarana dan saluran informasi publik melalui berbagai media							
			Menjalin komunikasi dengan pihak media massa untuk memberikan informasi positif tentang implementasi kebijakan dan pembangunan daerah							
38	Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber	Mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, terutama dari pajak dan	Pengembangan sistem pemungutan pajak yang transparan dan	Persentase kontribusi pajak terhadap PAD	67,87%	80,06%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan	Keuangan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
	penerimaan daerah secara efektif dan efisien	retribusi daerah	efisien				Daerah	Daerah		Pemerintahan Unsur Keuangan
			Meningkatkan kerjasama dengan lembaga keuangan dan instansi terkait lainnya							
			Mendorong peningkatan kesadaran wajib pajak							
			Meningkatkan kualitas pendataan dan penetapan pajak							
			Meningkatkan kinerja BUMD untuk mendukung kemandirian keuangan daerah	Persentase kontribusi bagi hasil BUMD terhadap PAD	3,35%	3,60%		Program Peningkatan Kinerja BUMD Pendukung Keuangan Daerah	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
			Pengendalian pengelolaan anggaran dengan sistem berbasis teknologi				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan
39	Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa	Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk usaha mikro	Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk usaha mikro	Tingkat pertumbuhan produktivitas usaha mikro sektor produksi barang dan jasa	Rp36.965.000	31%	1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 2. Program Pemberdayaan Ekonomi	Program perluasan jangkauan pemasaran	Perdagangan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
							Masyarakat Pesisir			
			Fasilitasi akses permodalan dan skema pembiayaan, termasuk Pengembangan kemitraan perusahaan besar dengan usaha mikro				1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 2. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Program perkuatan permodalan usaha mikro	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
			Peningkatan kualitas SDM usaha mikro dalam pengaplikasian teknologi tepat guna				1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 2. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Program standarisasi produk usaha mikro	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
			Fasilitasi kepemilikan sertifikat mutu produk							
40	Meningkatkan produktivitas koperasi	Meningkatkan proporsi jumlah koperasi sehat melalui penataan kelembagaan dan pembinaan usaha	Pemantauan kinerja koperasi melalui pendampingan RAT	Tingkat pertumbuhan produktivitas koperasi	Rp1.604.549.787.000	35%	Program Peningkatan Kualitas Koperasi	Program penguatan kelembagaan koperasi	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
			Peningkatan kapasitas SDM pengelola dan pengurus koperasi pada aspek kelembagaan							
			Fasilitasi promosi				Program	Program	Koperasi,	Perangkat

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
			unit bisnis koperasi				Peningkatan Kualitas Koperasi	peningkatan kualitas usaha koperasi	Usaha Kecil, dan Menengah	Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
			Sertifikasi pengelola usaha simpan pinjam							
41	Meningkatkan produktivitas sektor pertanian	Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk pertanian	Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk pertanian	Tingkat Produktivitas budidaya pertanian	3,16 ton/ha	3,92 ton/ha	1. Program Pelayanan Pembibitan dan Penyuluhan pertanian/Perkebunan, Perikanan dan Peternakan 2. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Program penyediaan Sarana Prasarana budidaya tanaman pangan dan hortikultura	Pertanian	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
							1. Program Pelayanan Pembibitan dan Penyuluhan pertanian/Perkebunan, Perikanan dan Peternakan 2. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Program pengaplikasian teknologi tepat guna dalam budidaya tanaman pangan dan hortikultura	Pertanian	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
			Penyediaan akses pasar melalui pelaksanaan even-even				1. Program Pelayanan Pembibitan dan Penyuluhan pertanian/Perkeb	Program peningkatan pemasaran hasil pertanian	Pertanian	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
			promosi produk pertanian				unan, Perikanan dan Peternakan 2. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan			Bidang Pertanian
			Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk peternakan				1. Program Pelayanan Pembibitan dan Penyuluhan pertanian/Perkebunan, Perikanan dan Peternakan 2. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Program pengaplikasian teknologi tepat guna dalam budidaya peternakan	Pertanian	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
							Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan ternak	Pertanian	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
42	Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan	Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk kelautan dan perikanan	Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk budidaya perikanan	Tingkat Produktivitas sektor perikanan tangkap dan budidaya	3,18 ton/orang	3,52 ton/orang	1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 2. Program Pengembangan Perikanan Budidaya 3. Program Pelayanan Pembibitan dan Penyuluhan pertanian/Perkeb	Program penyediaan Sarana Prasarana kelautan dan perikanan	Kelautan dan Perikanan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
							unan, Perikanan dan Peternakan 4. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir			
							1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 2. Program Pengembangan Perikanan Budidaya 3. Program Pelayanan Pembibitan dan Penyuluhan pertanian/Perkebunan, Perikanan dan Peternakan 4. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Program pengaplikasian teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan	Kelautan dan Perikanan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
43	Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif	Mengembangkan pusat-pusat desiminasi teknologi dan informasi dan pendampingan untuk pengembangan ekonomi kreatif	Pemanfaatan fasilitas publik sebagai pusat desiminasi teknologi, informasi dan pendampingan dalam pengembangan ekonomi kreatif masyarakat kota	Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif	400 pelaku usaha	8%		Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
								Program legalisasi usaha kreatif	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Perangkat Daerah yang melaksanakan

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
										Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
								Program perkuatan permodalan usaha kreatif	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
44	Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan	Meningkatkan daya tarik wisata	Peningkatan kualitas Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)	Tingkat pertumbuhan penerimaan sektor penunjang pariwisata	Rp5.525.803.646.224	45,76%	Program pengembangan destinasi pariwisata	Program pengembangan destinasi wisata	Pariwisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
			Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* bidang pariwisata				Program pengembangan destinasi pariwisata	Program pengembangan kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata	Pariwisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
			Meningkatkan *image*/*branding*/ikon pariwisata Surabaya melalui strategi promosi yang efektif				Program pengembangan pemasaran pariwisata	Program pemasaran pariwisata	Pariwisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
			Penyelenggaraan *event* yang mempunyai daya tarik secara							

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
			periodik							
45	Meningkatkan realisasi PMA dan PMDN (SPIPISE dan non SPIPISE)	Meningkatkan iklim investasi dan usaha dengan memberikan kepastian usaha dan mengembangkan daya tarik investasi	Pemberian kepastian usaha melalui regulasi penanaman modal dan usaha Pengembangan strategi promosi investasi	Rata- rata pertumbuhan nilai realisasi investasi	-2,83%	5,00%	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Program peningkatan iklim dan realisasi investasi	Penanaman Modal	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
46	Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien	Meningkatkan kapasitas sistem drainase kota untuk mengurangi dampak genangan air saat musim hujan dan laut pasang	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase secara rutin dan berkelanjutan Pemantauan rutin ketinggian air terutama saat musim hujan dan laut pasang	Indeks Genangan	48,33	39,77	Program Pengendalian Banjir	Program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase kota	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
47	Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan	Mengembangkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan yang terkoneksi dengan jaringan jalan regional dan nasional	Penambahan dan peningkatan jaringan jalan Pemantapan kondisi jaringan jalan	Tingkat kehandalan jaringan jalan	N/A	0,42	Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
48	Menyediakan sistem manajemen transportasi yang	Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas	Menginformasikan standar keselamatan lalu lintas secara massal	Persentase Jalan Kewenangan Kota dengan V/C ratio ≤	N/A	40%	Program Pengembangan Sistem Transportasi	Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi	Perhubungan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
	berkualitas		Penyediaan prasarana fasilitas perlengkapan jalan yang memadai	0.95						Bidang Perhubungan
			Penerapan *traffic demand management*							
49	Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan	Meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum massal dan berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi	Peningkatan sistem manajemen angkutan umum massal yang aman, nyaman dan ramah	Load factor kendaraan umum (Angkot)	26,8%	30%	Program Pengembangan Sistem Transportasi	Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan	Perhubungan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
			Pembangunan dan pengembangan prasarana perpindahan moda transportasi kota yang aman, nyaman dan terintegrasi dengan pelayanan regional dan nasional	Load factor kendaraan umum (Bis Kota)	N/A	42%				
			Pelaksanaan pengujian kelayakan kendaraan angkutan (KIR) sesuai ketentuan							
50	Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas	Menyediakan air bersih yang mudah diakses	Penyediaan sarana jaringan air bersih	Cakupan layanan teknis air bersih	92,66%	100%	Program Pembangunan Jaringan Air	Program Pembangunan Jaringan Air	Pekerjaan Umum dan Penataan	Perangkat Daerah yang melaksanakan

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
	layanan air bersih	masyarakat	Koordinasi pengembangan sistem distribusi air bersih dengan BUMD				Bersih Perkotaan	Bersih Perkotaan	Ruang	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
51	Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU	Meningkatkan kuantitas, efektivitas dan efisiensi penggunaan PJU yang terpasang	Penerapan sistem manajemen dalam pemantauan dan pemeliharaan PJU secara berkala	Persentase panjang jalan yang sudah terpasang PJU dalam kondisi baik	5,17%	17,51%	Program Utilitas Perkotaan	Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Penyediaan utilitas PJU							
			Penggunaan PJU hemat energi							
52	Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya	Menyediakan sarana utilitas kota secara terpadu untuk mendukung kebutuhan perkembangan kota	Koordinasi penataan utilitas dan sarana prasarananya	Persentase pelaksanaan rekomendasi utilitas	N/A	100%	Program Utilitas Perkotaan	Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Pengawasan instalasi dan penataan utilitas serta sarana prasarananya							

Keterangan : Seluruh strategi, arah kebijakan, dan indikator terkait dengan pendidikan menengah bersifat tentatif.